



INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND

QUARTERLY
PROGRESS
R E P O R T

2018

Periode **JANUARI-MARET**



Daftar Isi



Pengantar__**3**

Rencana Kerja ICCTF Tahun 2018__**4**

Fokus Area 1: Mitigasi Berbasis Lahan__**5**

Fokus Area 2: Adaptasi & Ketangguhan__**12**

Fokus Area 3: Energi __**14**

Perhitungan Penurunan Emisi Karbon
Program ICCTF 2010 – 2018__**15**

Komunikasi & Penjangkauan__**17**

Pertemuan Majelis Wali Amanat (MWA)__**19**

*Networking*__**21**

Pengembangan Proposal *Fundraising*__**23**

Kelembagaan__**26**

Informasi Audit dan Keuangan__**31**

Lampiran: *Lesson Learned* dan Liputan
Media__**34**

Sebagai bagian dari solusi global dalam upaya penanganan perubahan iklim, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sampai 29% pada tahun 2030. Sebagaimana diketahui, Indonesia, beserta penduduk dan keanekaragaman hayatinya, sangat rentan terhadap dampak negatif perubahan iklim. Tindakan nasional perlu dilakukan untuk mengurangi perubahan iklim global termasuk upaya menerapkan strategi dan langkah-langkah beradaptasi terhadap perubahan iklim. *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) merupakan instrumen penting bagi Pemerintah Indonesia untuk mencapai target-target mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) dan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API).

Pada tahun 2018 ICCTF didukung oleh pendanaan dari Pemerintah Indonesia serta mitra pembangunan lainnya seperti Pemerintah Amerika Serikat melalui USAID, Pemerintah Inggris melalui UKCCU, dan Pemerintah Denmark melalui DANIDA. ICCTF memberikan dukungan terhadap mitra-mitra nasional dan lokal untuk melaksanakan program mitigasi, energi serta adaptasi perubahan iklim. Mitra nasional dan lokal ini termasuk lembaga penelitian, universitas, organisasi non-pemerintah, organisasi berbasis masyarakat, serta koperasi.

Laporan triwulan ini merangkum kegiatan dan capaian ICCTF selama periode Januari sampai Maret tahun 2018. Pada triwulan ini, ICCTF fokus terhadap upaya percepatan capaian mitra pelaksana program di lapangan sesuai dengan rencana kerja. Pada periode ini, ICCTF juga fokus terhadap pengembangan program baru yakni *Coral Reef Rehabilitation and Management Program* (COREMAP) yang terkait dengan pengembangan *thematic window* baru ICCTF yakni *marine-based*. Terkait strategi komunikasi dan penjangkauan ICCTF terus melakukan optimalisasi media sosial serta *media monitoring*. Salah satu agenda penting yang dilaksanakan pada triwulan I adalah Pertemuan Majelis Wali Amanat (MWA) untuk mendapatkan arahan mengenai bentuk kelembagaan ICCTF kedepan (*New ICCTF*).

TUJUAN ICCTF

Mendukung Pemerintah Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca melalui ekonomi rendah karbon dan adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim.



Rencana Kerja ICCTF Tahun 2018 telah disetujui dalam Pertemuan Majelis Wali Amanat ICCTF pada tanggal 22 Maret 2018 di Bappenas. Dalam Rencana Kerja kuartal 1 (Q1) 2018, beberapa kegiatan utama yang telah dilaksanakan antara lain: *Project Closing USAID Batch 1, Additional Funding DANIDA & UKCCU, Emission & Carbon accounting, Amendment of ICCTF Bylaws, Technical Guidelines (SOP) ICCTF, ICCTF Social Media Optimization, 1st Annual MWA Meeting*, serta *Monev & Pemeriksaan BMN*.

Untuk Rencana Kerja Q2 2018, ICCTF akan melaksanakan beberapa kegiatan antara lain: *Project Closing UKCCU (11 proponent), Project Closing USAID (16 proponent), Call*

for Institution USAID & UKCCU, Induction Workshop, Validation of Emission & Carbon Accounting, Media Visit USAID & UKCCU, BIMINDO Workshop, Capacity Building Staff ICCTF, Monev & Pemeriksaan BMN, Media Partnering & Finalisasi grand Design Komunikasi, dan Ekspose Tingkat Provinsi.

Selanjutnya dalam Rencana Kerja Q3 2018, ICCTF akan melaksanakan kegiatan berupa: *Seminar Hasil Project Closing USAID dan UKCCU, New Proposals for Fundraising (GEF-COREMAP, BMUB-Bimindo, NAMA Facility-Green Chiller, dll), New ICCTF Preparation, ICCTF Day, Monev & Pemeriksaan BMN, Arrangement New Office ICCTF, dan Audit Eksternal.* Sedangkan pada Q4 2018, Rencana Kerja ICCTF meliputi: *UNFCCC COP-24 & Low Carbon Development Initiative (LCDI) di Bali, ICCTF Annual Report 2018, ICCTF Annual Work Plan 2019, New Project Implementation (COREMAP, dll), Staff Hiring for 2019, 2nd Annual MWA Meeting, serta Monev & Pemeriksaan BMN.*

KUARTAL 1

JANUARI - MARET

- *Project Closing USAID Batch 1*
- *Additional Funding DANIDA & UKCCU*
- *Emission & Carbon accounting*
- *Amendment of ICCTF Bylaws*
- *Technical Guidelines (SOP) ICCTF*
- *ICCTF Social Media Optimization*
- *1st Annual MWA Meeting*
- *Monev & Pemeriksaan BMN*

KUARTAL 2

APRIL - JUNI

- *Project Closing UKCCU (11 proponent)*
- *Project Closing USAID (16 proponent)*
- *Call for Institution USAID & UKCCU*
- *Induction Workshop*
- *Validation of Emission & Carbon Accounting*
- *Media Visit USAID & UKCCU*
- *BIMINDO Workshop*
- *Capacity Building Staff ICCTF*
- *Monev & Pemeriksaan BMN*
- *Ekspose Tingkat Provinsi*

KUARTAL 3

JULI - SEPTEMBER

- *Seminar Hasil Project Closing USAID dan UKCCU*
- *New Proposals for Fundraising (GEF-COREMAP, BMUB-Bimindo, NAMA Facility-Green Chiller, etc.)*
- *New ICCTF Preparation*
- *ICCTF Day*
- *Monev & Pemeriksaan BMN*
- *Arrangement New Office ICCTF*
- *Audit Eksternal*
- *Media Partnering & Finalisasi Grand Design Komunikasi*

KUARTAL 4

OKTOBER - DESEMBER

- *UNFCCC COP-24 & Low Carbon Development Initiative (LCDI) in Bali*
- *ICCTF Annual Report 2018*
- *ICCTF Annual Work Plan 2019*
- *New Project Implementation (COREMAP, etc.)*
- *Staff Hiring for 2019*
- *2nd Annual MWA Meeting*
- *Monev & Pemeriksaan BMN*



Fokus Area 1

MITIGASI BERBASIS LAHAN

Fokus area ini bertujuan untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui dukungan pendanaan terhadap program-program reforestasi/ rehabilitasi lahan-lahan terdegradasi, pemulihan lahan terdegradasi menjadi hutan masyarakat, energi-biomassa dan *agroforestry*, rendah karbon dan manajemen produktif lahan gambut terdegradasi, dan pengelolaan kawasan konservasi lestari.

Pada tahun 2016 -2018, ICCTF telah mendanai total sebanyak 31 proyek mitigasi berbasis Lahan yang terdiri atas 20 proyek ICCTF-USAID dan 11 Proyek ICCTF-UKCCU. Pada kuartal-4 (Q4) 2017 yang lalu terdapat 1 proyek Mitigasi Berbasis Lahan ICCTF-USAID yang telah selesai yaitu SESAMI. Sedangkan pada (Q1) 2018 terdapat total 12 proyek yang telah selesai, yaitu 8 proyek ICCTF-USAID (STIK, Yayorin, Javlec, UMP, Walestra, YPAM, LOH, dan Yayasan Tessonilo) dan 4 proyek ICCTF-UKCCU (YMI, Walhi Sumsel, KRG Jambi, dan BNF). Sehingga terdapat sebanyak total 18 proyek Mitigasi Berbasis Lahan yang masih berjalan hingga akhir Q2 2018 mendatang. Selama Q1 2018, ICCTF telah melaksanakan kegiatan *financial spot check* dan *program monitoring* beberapa lokasi proyek untuk memastikan pelaksanaan proyek Mitigasi Berbasis Lahan sesuai dengan rencana kerja dan mekanisme pengelolaan proyek yang ditetapkan oleh ICCTF sebagaimana ditunjukkan tabel berikut.

No.	Judul Program	Mitra Pelaksana	Sumber Dana	Lokasi	Jadwal
1	Pemulihan dan Perlindungan Ekosistem Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Berbasis Masyarakat dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Sekitarnya	Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo	USAID	Kab. Pelalawan, Riau	11-13 Februari 2018
2	Konservasi Ekosistem Nipah dan Hutan Penyangga Bagian Timur Suaka Margasatwa Sungai Lamandau Sebagai Kawasan Pencadangan Hutan Kemasyarakatan (HKm)	Yayasan Orangutan Indonesia (Yayorin)	USAID	Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah	15-18 Februari 2018
3	Mitigasi Berbasis Lahan pada Kawasan Karst, DAS Kritis, dan Kawasan Konservasi	Yayasan Javlec Indonesia	USAID	Kab. Gunung Kidul, DIY	15 - 17 Feb 2018
4	Peningkatan Budidaya Bambu Cendani Untuk Penyelamatan Lahan Kritis di Sub DAS Grenjeng DAS Serang Desa Sampetan Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah	Yayasan Pengembangan Akhlaq Mulia	USAID	Kab. Boyolali, Jawa Tengah	18 Feb 2018
5	Konservasi Hutan Berbasis Masyarakat dan Mitigasi Perubahan Iklim di Bentang Alam Kerinci Seblat	Walestra	USAID	Kab. Sarolangun & Kab. Kerinci, Jambi; Kab. Solok Selatan, Sumatera Barat	Jambi: 21 - 23 Feb 2018 Solsel: 24 - 25 Feb 2018

No.	Judul Program	Mitra Pelaksana	Sumber Dana	Lokasi	Jadwal
6	Rehabilitasi Lahan dan Hutan Melalui Pengembangan Hkm Untuk Peningkatan Daya Dukung DAS Moyo.	Yayasan Lembaga Olah Hidup	USAID	Kab. Sumbawa, NTB	2 - 5 Maret 2018
7	Inisiasi Kelompok Perempuan dalam Mengurangi Emisi yang berasal dari Kebakaran Hutan, Kebun dan Gambut di Kelurahan Pelintung, Guntung, Mundam dan Teluk Makmur Kotamadya Dumai (Pendekatan Kolaborasi Kelompok Perempuan dan Masyarakat Peduli Api dalam Penanggulangan Karhutla Untuk Mengurangi Emisi Karbon)	Riau Women Working Group	UKCCU	Dumai-Riau	12-16 Januari 2018 dan 12-15 Februari 2018 dan 15-17 Maret 2018
8	Mitigasi Perubahan Iklim melalui Peningkatan Peran serta Para Pihak dalam Pengelolaan Hutan dan Lahan Gambut berbasis Kesatuan Hidrologi Gambut	Konsorsium Yayasan Mitra Insani	UKCCU	Siak & Pelalawan-Riau	12-16 Januari 2018 dan 26 Februari - 1 Maret 2018
9	Perlindungan dan Pengelolaan Gambut Melalui Skema Desa Ekologis	Walhi Sumatera Selatan	UKCCU	Kab. Ogan Komering Ilir- Sumatera Selatan	24-26 Januari 2018 dan 19-22 Februari 2018
10	Pembangunan Demplot dan Pilot Restorasi Gambut di Kawasan Hutan Rawa Gambut Bekas Terbakar sebagai Lokasi Percontohan di Lokasi Prioritas Program Badan Restorasi Gambut Kabupaten MUBA dan OKI di Sumatera Selatan	Perkumpulan Hutan Kita Institute	UKCCU	Kab. Musi Banyuasin dan Kab. Ogan Komering Ilir- Sumatera Selatan	24-26 Januari 2018
11	Membangun Model Pertanian Berkelanjutan dan Pemulihan Ekosistem Gambut Terbakar Berbasis Tataguna Lahan	Konsorsium Restorasi Gambut Jambi	UKCCU	Kab. Tanjung Jabung Timur, Jambi	21-24 Februari 2018
12	Peatland Protection and Restoration in the Sabangau River catchment, Central Kalimantan	Borneo Nature Foundation Indonesia	UKCCU	Kotamadya Palangkaraya- Kalimantan Tengah	5-8 Maret 2018

Capaian kegiatan pada fokus area Mitigasi Berbasis Lahan:

Kunjungan lapangan spotcheck dan programmatic monitoring ke Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo bertemu dan berdiskusi dengan Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo, Pemerintah Desa dan Kelompok Wanita. Kepala Balai menjelaskan telah disusun peta rencana pengelolaan TNTN berbasis masyarakat di hutan akasia seluas 4.000 ha. Melalui dukungan proyek ICCTF ini uji coba penanaman dilakukan di desa Lubuk Kembang Bunga seluas 125 ha dan desa Air Hitam seluas 125 ha dengan tanaman hutan asli dan MPTS

asli kawasan misalnya jengkol, nangka, dan cempedak. Masyarakat melalui Pemerintah Desa Lubuk Kembang Bunga menyambut antusias program ini karena merasa ada perubahan kebijakan yang mengakomodir kepentingan masyarakat tani hutan di sekitar kawasan BTNTN. Hasil program ini juga sudah dirasakan Kelompok Wanita binaan dimana mereka mampu menghasilkan penjualan madu Rp 380.000/liter/kotak sarang untuk pemeliharaan lebah selama 3 bulan.



Diskusi bersama Kepala BTNTN dan YTNTN.



Keramba Jala Apung (KJA), Kel. Tani Sumber Rezeki.



Budidaya lebah madu kelulut (trigona) di TNTN.



Kunjungan ke ladang Pertanian kel Tani Sumber Rezeki.

Pada kunjungan lapangan ke proponent Yayasan dilakukan di Desa Tanjung Putri, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Asset BMN yang diperiksa adalah kolam terpal yang berjumlah (6 kolam) untuk pembenihan ikan toman, gabus dan gurame, peralatan sarana hasil produksi olahan hasil pertanian/perikanan dalam bentuk aneka makanan oleh Kelompok tani Wanita Mandiri, Rumah Outklet Usaha untuk penjualan produk, serta bibit tanaman kehutanan yaitu, Galam, Idat, Pulai, Nyatoh, Ramin, Papung, Belangeran, Terotungan yang sudah tertanam di Desa Tanjung Putri. Dilanjutkan dengan pengecekan Kolam Apung keramba yang berjumlah 10 kolam untuk pemeliharaan ikan Toman, Gabus dan Gurame, dan Alat Pemadam Api berjumlah 5 unit, serta Bibit sayuran seperti, terong, timun, cabe, semangka yang telah tertanam dan dipanen dengan baik. Tantangan yang dihadapi masyarakat desa Tanjung Putri adalah akses jalan yang sangat buruk sehingga menghambat pemasaran hasil produksi kelompok tani.

Kunjungan lapangan pemeriksaan asset BMN ke proyek Javlec dilakukan ke 3 desa yaitu, Desa Kedungpoh, Desa Bleberan dan Desa Dengok. Aset yang diperiksa adalah bibit-bibit tanaman berjumlah 66.802 bibit yang terdiri dari: Jati Unggul, Akasia Mangium, Sengon, Gmelina, Mangga, Kelengkeng, Rambutan, Durian, Jambu Merah Biji, Jambu Deli Hijau, Sirsak, Jeruk Pamelon, Kayu Afrika, Asam Jawa, Beringin, Jabon, Kaliandra, Alpukat, Kemiri, Kakao, Aren, Matoa, Pete, Sawo Sedan, Cemara Laut, Sawo Kecil dan Nangka. Bibit tersebut adalah bibit bersertifikasi BPTH dan BPSP yang telah didistribusikan dan ditanam oleh masyarakat. Penanaman dilakukan pada lereng dan sekitaran DAS.



Pemeriksaan Asset BMN berupa bibit tanaman oleh Tim ICCTF & Bappenas di Desa Gedungpoh.



Tim ICCTF & Bappenas bediskusi dengan Kelompok Tani Manunggal, Desa Bleberan.

Kunjungan Lapangan ke YPAM dimulai dengan diskusi terkait asset BMN bibit tanaman bambu cendani, bambu betung dan alpukat wina. Semua bibit tersebut telah tertanam dengan baik pada demplot lahan yang disediakan. Masyarakat mendapat dukungan dari asosiasi alpukat Bandungan Semarang dan Balai Penyuluh Pertanian Ampel untuk pembudidayaan tanaman tersebut. Penanaman ini untuk mendukung kelesatarian DAS Grenjeng dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui kerajinan untuk mendukung wisata daerah. Diskusi bersama Kepala Balai BPP Ampel menghasilkan komitmen untuk meneruskan pemberdayaan masyarakat dan pengolahan pasca panen.



Bambu betung yang tumbuh dengan baik di sekitar DAS.

Pada kunjungan lapangan ke Walestra di Jambi, proponent melaporkan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain pengadaan peralatan pengolah biji kopi, produksi minyak kepayang, GPS dan Perlengkapan patroli yang telah diserahkan masyarakat untuk patroli secara mandiri, perencanaan program wisata dengan adanya pos jaga yang telah dibangun. Dilanjutkan dengan pemeriksaan Aset BMN antara lain alat pengolah biji kopi, bibit tanaman campuran di hutan adat, kebun kopi dan pos jaga. Walestra akan melaksanakan pelatihan dan pengukuran karbon sebelum proyek berakhir. Selanjutnya, kunjungan ke Solok Selatan bertemu dengan masyarakat Nagari Lubuk Gadang Selatan dan Nagari Sako Utara Pasir Talang. Peninjauan budidaya madu dan diskusi rencana pengembangan potensi HHBK termasuk penanaman komoditi (kopi, durian, dll) oleh masyarakat (1000-2000 bibit/orang) dilakukan di Nagari Lubuk Gadang Selatan. Sedangkan di Nagari Sako Utara Pasir Talang mengunjungi pusat pembibitan (pinang, karet, cokelat, kopi, dan lainnya), pemeriksaan aset BMN yang ada di Kantor Wali Nagari, pemberdayaan masyarakat pengrajin pengolah hasil hutan (rotan, dll), Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Sako Utara Pasir Talang yang melakukan patroli hutan dan penyusunan Peraturan Nagari tentang tata ruang desa.



Budidaya Alpukat wina di pekarangan masyarakat.

Diskusi progres pendampingan terkait skema perhutanan sosial dengan Walestra, Wali Nagari dan LPHN Lubuk Gadang Selatan.





Budidaya lebah madu oleh LPHN Lubuk Gadang Selatan.

Kunjungan lapangan ke proponen LOH dilakukan di Desa Lito, Kec. Moyo Hulu, Kab. Sumbawa NTB. Kegiatan yang dilakukan LOH antara lain peningkatan kapasitas HKM Samoko, pemulihan DAS Kritis seluas 200 Ha dengan penanaman bibit 72.000 bibit tahun 2016 dan 67.000 bibit tahun 2017, pemasaran hasil panen masyarakat berupa produk dari tanaman pangan, obat dan buah, serta pembuatan film documenter untuk pembelajaran. Bibit yang sudah ditanam telah tumbuh dengan baik. Telah dilakukan pengukuran karbon oleh LOH dengan hasil 20.000 – 31.000 ton/ha yang akan dianalisis lebih lanjut oleh KPH Ropang. Pemerintah Desa mengharapkan proyek ini dapat direplikasi ke lokasi lainnya. Selain itu, program ini diharapkan dapat berkembang secara mandiri menjadi koperasi ataupun BUMDes.



Diskusi bersama Masyarakat Desa Lito di salah satu rumah warga.



Bapak Sama, salah satu pengelola lahan di Dusun Lito di depan pohon gamelina yang ditanamnya pada tahun 2016.

Pada kunjungan lapangan ke proponen RWWG dilakukan pengecekan persiapan Pembuatan kolam, pengadaan bibit ikan, pembangunan kanal bloking. Selanjutnya dilakukan kunjungan ke 4 Desa penanaman Jelutung dan Penanaman Jahe. Untuk pemeriksaan asset BMN lainnya adalah GPS, Mesin pelet dan Peta. Semua kegiatan RWWG ditarget dapat selesai dilaksanakan hingga masa akhir proyek yaitu Februari 2018.



Demplot Tanaman Jahe merah Desa Guntung.



Lokasi pembuatan Sekat kanal di Desa Mundam.

Pertemuan dengan masyarakat Desa Gambut Mutiara dan Segamai menjadi kegiatan pertama kunjungan lapangan ke proyek Yayasan Mitra Insani. *Scaling-up* dari proyek ICCTF didesa ini adalah replikasi program oleh 3 Desa di Gambut Mutiara, Serapung dan Segamai melalui fasilitasi MPA menggunakan Dana Desa sebesar Rp 30 Juta di tahun 2018. Dilakukan pula pengecekan asset BMN di 2 desa tersebut antara lain mesin pompa air, perlengkapan pemadam kebakaran, bibit (kopi, cabe, sawi, padi, jagung dan bawang), kanal bloking, paket radio komunitas, Komputer untuk GIS, *Drone*, dan Sarana penunjang ekowisata berupa rumah pantau dan *track* sepanjang 500 m. Kegiatan yang akan dilaksanakan proponent selanjutnya adalah penyusunan rencana aksi, FGD dan *workshop*.



Bibit cabe yang telah ditanam di Desa Segamai.



Bibit cabe yang telah ditanam di Desa Segamai.

Pada kunjungan lapangan ke Walhi Sumsel di Desa Bangsal, dilakukan diskusi bersama 34 orang masyarakat penerima manfaat. Di desa ini telah terbangun demplot agroforestry dan pakan ternak seluas 10 ha. Telah dilakukan pula TOT bagi 20 peserta dan sirkulasi buku kelola lahan gambut untuk 19 sekolah di Kecamatan Pampangan dan Air Sugihan. Selanjutnya, akan dilakukan penyusunan Perdes tata ruang desa dan pengelolaan Pertanian serta 12 kegiatan lainnya. Pada kunjungan berikutnya ke Desa Nusantara, demplot *agroforestry* juga sudah tertanam

namun terdapat beberapa bibit mati (bayam, sawi, cabe) karena cuaca. Jenis sayuran yang telah di panen adalah kangkung cabut. Padi, kacang panjang, dan kacang tanah masih tumbuh dengan baik. Di desa ini juga telah terbangun 2 sekat kanal yang telah dirasakan dampaknya oleh masyarakat.



Demplot penanaman padi Desa Nusantara.



Beberapa perempuan yang telah memanen hasil kebun di Demplot agroforestry Desa Bangsal.

Pertemuan dengan Pemerintah Desa Menang Raya dan Masyarakat penerima manfaat proyek yang dilaksanakan HAKI dihadiri sebanyak 14 orang. Di lokasi ini telah terbangun demplot *agroforestry* seluas 26 ha di empat desa dengan 7 jenis pengayaan tanaman sebanyak 10.400 bibit. Telah disusun juga 1 SOP dan *Early Warning System* (EWS) untuk Kab. Banyuasin dan Kab. OKI. Selanjutnya akan dilakukan pelatihan untuk pembangunan 16 sumur bor.



Diskusi dengan penerima manfaat di Desa Menang Raya.



Pos pengamatan kebakaran hutan dan lahan gambut.

Hasil kunjungan lapangan ke KRG Jambi KRG Jambi diketahui bahwa seluruh *output* sudah tercapai, namun masih ada beberapa kegiatan yang perlu diselesaikan antara penanaman sisa bibit tanaman dan pembuatan sekat kanal untuk lebar 8 meter. Dilakukan pengecekan aset BMN yang terdiri dari peralatan pemadam kebakaran, demplot tanaman berekonomi tinggi 2 ha, sekolah lapang, sekat kanal lebar 5 meter di 3 (tiga) desa yaitu Kota Kandis Dendang, Jatimulyo dan Catur Rahayu dengan kondisi baik. Sekolah Lapang di 3 desa menjadi aktivitas utama pemberdayaan masyarakat untuk mengelola demplot yang dilengkapi peralatan dan sarana Pertanian.



Pemeriksaan BMN Sekat Kanal di Desa Kota Kandis Dendang.



Pemeriksaan BMN Saung Sekolah Lapang di Desa Jatimulyo.

Kunjungan lapangan ke proyek *Borneo Nature Foundation* dilakukan dengan mengecek bangunan DAM dan reforestrasi lahan gambut bekas terbakar (tanaman dan alat pemantau air). Sudah terpasang 150 DAM serta penanaman dan pemasangan pengukur level air. Dilanjutkan pengecekan aset BMN untuk peralatan pemadam kebakaran 2 MPA Desa Sabaru dan Desa Kereng Bengkirai. Kegiatan yang akan dilaksanakan selanjutnya adalah penambahan alat GPS dan HT untuk MPA di dua Desa yakni Desa Sabaru dan Desa Kereng Bengkirai serta diseminasi Karhutla dan kampanye ke sekolah maupun puskesmas.



Pengecekan tanaman di Dempot BNF.



MPA Desa Kereng Bengkirai.



Fokus Area 2

ADAPTASI & KETANGGUHAN

Fokus area ini bertujuan untuk memperkuat lembaga-lembaga lokal dan nasional di Indonesia serta masyarakat yang rentan terhadap dampak perubahan iklim melalui diseminasi informasi iklim, pengembangan dan inovasi strategi adaptasi, pemanfaatan teknologi dan pengetahuan, serta mempromosikan penyusunan kebijakan untuk adaptasi.

Pada tahun 2016 sampai dengan 2018, ICCTF juga telah mendanai 11 proyek Adaptasi dan Ketangguhan melalui pendanaan USAID. Pada kuartal-4 (Q4) 2017, 5 proyek telah selesai yaitu ITB, IPB, YLHS, YEU dan Transformasi. Sedangkan pada Q1 2018, terdapat 2 proyek yang selesai yaitu UGM dan Puska-UI sehingga proyek yang masih berjalan hingga Q2 2018 mendatang tersisa sebanyak 5 proyek. Selama Q1 2018, ICCTF telah melaksanakan kegiatan *financial spot check* dan *program monitoring* keberapa lokasi proyek untuk memastikan pelaksanaan proyek Adaptasi dan Ketangguhan sesuai dengan rencana kerja dan mekanisme pengelolaan proyek yang ditetapkan oleh ICCTF sebagaimana ditunjukkan tabel berikut.

No.	Judul Program	Mitra Pelaksana	Sumber Dana	Lokasi	Jadwal
1	<i>Establishment of Regional Networks for a Rural Response to Climate Change with Farmers, Scientists, and Extension</i>	Pusat Kajian Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia	USAID	Kab. Indramayu, Jawa Barat; Kab. Lombok Timur, NTB	13-14 Feb 2018 dan 14-15 Feb 2018
2	Proyeksi Iklim dan Strategi Adaptasi Budidaya Padi SRI (<i>System of Rice Intensification</i>) Terhadap Perubahan Iklim Regional Dengan Pendekatan Model Integrasi Iklim-Tanaman-Tanah-Air di Nusa Tenggara Timur	Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada	USAID	NTT	19-20 Feb 2018

Capaian kegiatan pada fokus area Adaptasi dan Ketangguhan:

Kunjungan Lapangan ke proponent Puska-UI dilakukan di Desa Mulyasari Kecamatan Bangau dengan meninjau lahan petani pemandu senior (Sekretaris KPCH) yang menjalankan budidaya padi organik. Dilanjutkan dengan memeriksa asset BMN berupa Omplong yang telah dititipkan kepada masyarakat tahun 2017. Omplong ini menurut KPCH sudah distandarisasi oleh BMKG. KPCH selain melakukan pengamatan curah hujan juga mengamati hama padi (keong mas) yang dijadikan pembelajaran bagi pengembangan budidaya padi Bongi (persilangan padi Kebo dan Pandan Wangi) yang dilakukan masyarakat. Pengamatan curah hujan 7-10 tahun mendatang akan menjadi dasar penentuan musim tanam. Dilanjutkan diskusi di kantor Desa Nunuk,

Kecamatan Lelea, masyarakat telah memanfaatkan Omplong sebanyak 50 unit. Perwakilan dari 4 lokasi turut hadir yaitu, KPCH desa Nunuk kecamatan Lelea, KPCH desa Karang Anyar kecamatan Kandang Haur, KPCH desa Amis kecamatan Cikedung, dan KPCH desa Gabus Kulon kecamatan Gabus Wetan. Untuk kunjungan ke desa Amis kecamatan Cikedung, dikunjungi ladang masyarakat yang telah menurunkan penggunaan pupuk kimia menjadi pupuk daun cair keong mas yang membuat padinya tumbuh baik. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan Omplong di lapangan antara lain BPP Kandang Haur, desa Karang Anyar, kelompok Gabus Kulon, kecamatan Gabus Wetan dan Petani di kecamatan Indramayu.



Kunjungan ke padi organik di desa Mulyasari.



Diskusi dengan KPCH desa Nunuk.

Spotcheck keuangan ke FTP-UGM dilakukan di kampus UGM Jogja, Hasil pemeriksaan diperoleh bahwa FTP-UGM telah melaksanakan pelaporan administrasi dan keuangan sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh ICCTF.



Spotcheck Tim ICCTF ke FTP-UGM.



Fokus Area 3

ENERGI

Usulan Mekanisme Pembiayaan Pengembangan Renewable Energy di Indonesia yang difasilitasi Kementerian PPN/Bappenas:



PT. SMI



BLU - RE



Clean Green Fund



Escrow Account



Existing ICCTF

Capaian kegiatan pada fokus area Energi:

Atas arahan Menteri PPN/Kepala Bappenas, pada tahun 2018 ICCTF bersama Direktorat Energi, Sumber Daya Mineral dan Pertambangan (ESDMP) Bappenas mendapatkan mandat untuk melakukan kajian dan memfasilitasi pengembangan pendanaan proyek Energi Terbarukan. Dalam pengembangan ini, beberapa mekanisme pendanaan sedang dikaji sebagai alternatif bagi penyaluran dana hibah maupun pinjaman untuk pengembangan investasi pembangkit energi terbarukan. Opsi-opsi yang sedang ditelaah lebih lanjut antara lain mekanisme *Trust Fund* (ICCTF) dan *Blended Financing*. Selanjutnya, akan dilaksanakan beberapa diskusi serta didukung beberapa tenaga ahli dan pakar untuk menghasilkan mekanisme yang paling optimal bagi pengembangan energi terbarukan di Indonesia sebagai rekomendasi untuk Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Selain itu, pada Q1 2018 ICCTF bersama GIZ juga mengembangkan sebuah proposal dibidang Energi Efisiensi untuk mengakses pendanaan dari NAMAs *Facility* yang berjudul "*Indonesia Green Cooling Program*". Tujuan program ini adalah mempercepat transformasi sektor *Air Conditioner* (AC) *Unitary Indonesia* ke peralatan yang hemat energi dan ramah iklim. Program ini telah diajukan kepada NAMAs *Facility* pada tanggal 15 Maret 2018 dengan pendanaan sebesar 16,67 Juta Euro.

Project Detail Indonesia Green Cooling Program (IGCP) yang telah diajukan kepada NAMAs Facility tanggal 15 Maret 2018

Project Details	
Project Title	Indonesia Green Cooling Program (IGCP)
Duration	06/2019 – 06/2026 (approx. 6 years)
Executing Agency	Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR) / ICCTF BAPPENAS
Project Objective	Accelerating the transformation of the Indonesian Unitary Air Conditioning sector to energy-efficient and climate-friendly appliances
Project Outcome	At least one Indonesian manufacturer produces energy-efficient and climate-friendly Unitary Air Conditioners (UAC). End-user enter alliances to procure and operate energy-efficient and climate-friendly UAC installed and serviced by certified technicians.
Budget	16.676.000 EUR (Financial support through NAMA facility) 120 Million EUR (Estimated overall program volume)

Perhitungan Penurunan Emisi Karbon Program ICCTF 2010-2018

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang besar terhadap pengurangan Emisi GRK (Gas Rumah Kaca). Komitmen tersebut disampaikan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada pertemuan G-20 di Pittsburgh tahun 2009. Komitmen ini kemudian dilanjutkan oleh Presiden Jokowi yang tertuang dalam *Nationally Determined Contribution (NDC)* Indonesia untuk mengurangi 29% dengan skenario *business as usual* (0,8 Giga ton CO₂-eq) dan 41% (1,2 Giga ton CO₂-eq) dengan bantuan dana internasional pada sampai tahun 2030. Namun, kebakaran dan asap di tahun 2015, yang juga dipengaruhi oleh dampak El-Nino, menempatkan Indonesia pada posisi tertinggi negara sebagai penyumbang emisi terbesar dari sektor kehutanan dan perubahan tata guna lahan di dunia. Dilaporkan bahwa emisi lahan gambut menjadi kontributor utama di bidang kehutanan dan perubahan tata guna lahan yang diperkirakan sebesar 395 MtCO₂-eq/tahun. Berbagai langkah konkrit dilakukan Pemerintah Indonesia termasuk penguatan institusi, kebijakan moratorium gambut/hutan, penguatan aksi mitigasi dan adaptasi di tingkat lokal dan nasional serta pemanfaatan energi terbarukan. Kegiatan terkait penurunan emisi GRK dalam sektor ini diharapkan dapat berimplikasi secara signifikan terhadap pencapaian komitmen Pemerintah Indonesia sesuai *Paris Agreement* yang disepakati pada COP 21 di Paris, sebagai bagian dari usaha global untuk membatasi kenaikan suhu bumi dibawah 2°C.

Untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) nasional, *Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)* di bawah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas diamanatkan untuk mengelola keuangan dari dalam dan luar negeri untuk diintegrasikan bersama mitra (*proponent*) di daerah prioritas dalam kegiatan mitigasi berbasis lahan serta adaptasi dan ketangguhan. Tidak hanya berfokus di lahan gambut, ICCTF juga berkolaborasi dengan *proponent* di bidang agrikultur pada tanah mineral, revegetasi hutan, pengembangan biogas, serta penguatan ekonomi dan sosial masyarakat lokal.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, ICCTF pada kuartal I ini melakukan beberapa aktifitas untuk melakukan

perhitungan pengurangan emisi GRK terhadap 63 proyek yang dikerjakan ICCTF yang fokus pada aktifitas mitigasi, adaptasi dan energi. Pada kegiatan pertama, ICCTF telah menyelenggarakan *Workshop* Perhitungan Capaian Pengurangan Emisi CO₂ di Jakarta pada tanggal 12-13 Maret 2018 yang diikuti oleh 63 Mitra ICCTF selama 2010 hingga 2018.

Sebagai bagian tindaklanjut dari kegiatan tersebut, dilakukan *Workshop* Validasi Perhitungan Emisi CO₂ di lahan gambut dan mineral. Pada lahan gambut, kegiatan tersebut dilakukan di 2 Wilayah, yakni Pekanbaru untuk wilayah Sumatera, yang dilaksanakan pada tanggal 28-29 Maret 2018 dan di Palangkaraya untuk Wilayah Kalimantan yang dilaksanakan pada tanggal 4-5 April 2018. Pada proyek di lahan gambut, kegiatan tersebut diikuti 16 mitra ICCTF yang bekerja di lahan gambut dan perwakilan dari desa intervensi ICCTF dengan total peserta kegiatan ini mencapai 150 orang yang berasal dari proponent dan masyarakat.

Sementara itu pada kelompok tanah mineral, dilakukan 2 kali *workshop* yakni di Bogor pada tanggal 9 s.d. 11 April 2018 yang dihadiri oleh proponent dari Jawa Barat, Banten, Sumatera dan Nusa Tenggara, kemudian dilanjutkan dengan workshop di Yogyakarta pada tanggal 12 s.d.14 April 2018 dengan peserta dari Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Sulawesi, dan Maluku. Kedua *workshop* tersebut diikuti oleh 16 mitra pelaksana ICCTF dengan total peserta 70 orang dari proponent dan masyarakat.

Pengukuran stok karbon dilakukan dengan metode alometrik. Dalam metode ini, setiap jenis spesies tumbuhan memiliki persamaan logaritma untuk mengetahui besaran stok karbon yang berbeda satu dengan lainnya. Selain karbon tanaman, dihitung juga karbon di bawah tanah dengan persamaan 0,25 kali karbon permukaan. Tumbuhan yang telah mati maupun daun berguguran (serasah) juga perlu diukur ketersediaan karbonnya.

Untuk melakukan pengukuran, terlebih dulu dilakukan tahapan penentuan plot atau *sampling*. Untuk penentuan *sampling*, perlu memperhatikan aspek tipe vegetasi, akurasi, presisi serta sumberdaya dan biaya.

Plot sendiri dapat berupa plot permanen maupun non-permanen. Plot non-permanen lebih sederhana dan hanya dapat digunakan untuk satu kali pengukuran, biasanya penghitungan data *baseline*. Sementara plot permanen lebih efisien untuk pengukuran jangka panjang yang memerlukan data perkembangan stok karbon seiring pertumbuhan pohon.

Stok karbon yang berhasil diukur juga menunjukkan penurunan emisi yang dapat dihitung dengan rasio berat molekul C : CO₂, atau dengan penyederhanaan diperoleh persamaan

$$\text{Penurunan Emisi CO}_2\text{e} = \text{Stok Karbon} \times 3,67$$

Dengan persamaan tersebut, dari *workshop* yang dilakukan kemudian diperoleh angka penurunan emisi CO₂e dari seluruh program ICCTF adalah sebesar 9,5 Juta ton CO₂e, dengan rincian ditunjukkan pada tabel di bawah.

Tabel Potensi Penurunan Emisi CO₂e dari Program ICCTF Tahun 2010-2018

Kegiatan	Jumlah Proponen	Penurunan Emisi (Ton CO ₂ e)
Energi	7	10.259,29
Emisi	3	3.002,20
Tanah Gambut	15	8.404.140,00
Tanah Mineral	17	870.758,29
<i>Mangrove</i>	3	222.639,80
Total	45	9.510.799,58



SETARA DENGAN
EMISI



5

juta penduduk Indonesia
per tahun

Emisi CO₂ perkapita penduduk Indonesia = 1.9 ton CO₂
(Worldbank, 2013)



190.000

penerbangan
PP dari Jakarta ke Jayapura

Emisi Jakarta - Jayapura - Jakarta = 0.5 ton CO₂
(sumber: icao.int; dengan asumsi 1 penerbangan membawa 100 penumpang)



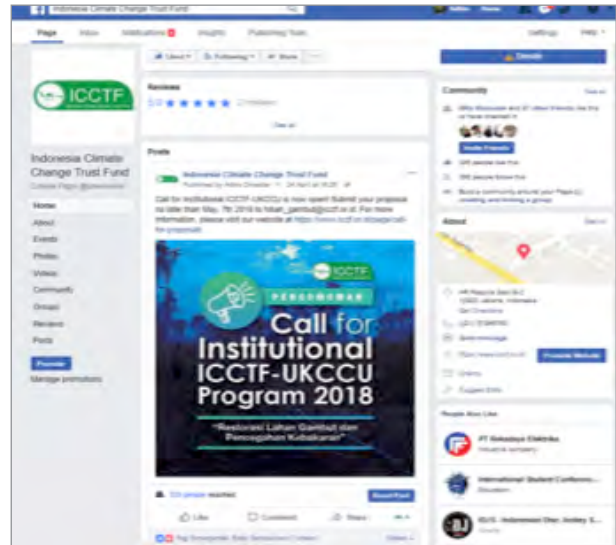
20%

dari total emisi GRK
nasional Swiss

Total emisi GRK Swiss tahun 2012 = 47 juta ton CO₂
(sumber: National Inventory Report of Switzerland)

Kegiatan komunikasi ICCTF terbagi atas dua strategi yaitu komunikasi internal dan eksternal. Melalui kegiatan-kegiatan komunikasi ini, eksistensi ICCTF sebagai satu-satunya lembaga perwalian dana perubahan iklim yang dilengkapi mandat pemerintah di Indonesia diharapkan dapat lebih dikenal dan diakui baik oleh pemangku kepentingan di dalam maupun luar negeri. Komunikasi internal menyasar seluruh staf ICCTF di semua level untuk meningkatkan pemahaman staf terhadap visi-misi dan tugas pokok menginternalisasikan nilai-nilai strategis serta membangun soliditas staf agar terbangun suatu budaya kerja ICCTF.

Sedangkan untuk kegiatan komunikasi eksternal ICCTF menekankan pada pengenalan



Tampilan media sosial Facebook ICCTF.

visi-misi, tugas pokok, fungsi dan program ICCTF. Selain itu juga mengkomunikasikan capaian serta pembelajaran program-program ICCTF yang layak untuk disebarluaskan dan direplikasi di daerah lainnya yang memiliki karakteristik dan permasalahan serupa. Upaya pengenalan dan penjangkauan publik ICCTF dilakukan dengan pola yang beragam, intensitas yang semakin meningkat dan target yang variatif. Pola komunikasi yang diterapkan secara umum tidak hanya dalam bentuk sosialisasi dan ekspose program-program ICCTF, tetapi juga dalam bentuk kunjungan dan liputan media ke lokasi program, *focus group discussion* (FGD), pameran dan seminar, optimalisasi sosial media dan website ICCTF, serta menjaga relasi dengan media melalui kegiatan media gathering. Pada triwulan 1, komunikasi lebih difokuskan pada upaya optimalisasi media sosial ICCTF dan monitoring publikasi dan pemberitaan ICCTF.

Sejak awal tahun 2018, ICCTF melakukan strategi pendekatan komunikasi interaktif dan real time melalui pengelolaan media sosial ICCTF yang terdiri atas **Facebook** (<https://www.facebook.com/Indonesia-Climate-Change-Trust-Fund-122147097846153/>); **Twitter** (@ICCTF_ID); **Instagram** (@icctfofficial); **Youtube** (ICCTF) dan **website** ICCTF (<https://www.icctf.or.id/>). ICCTF berupaya untuk selalu mengunggah informasi dan foto-foto kegiatan terkini yang dilakukan oleh ICCTF dan para mitra pelaksana di daerah. Informasi-informasi tersebut dibagikan agar para pemangku kepentingan tetap terinfo sejauh mana capaian program ICCTF dan nilai-nilai kebaruan/pembelajaran apa saja yang didapatkan



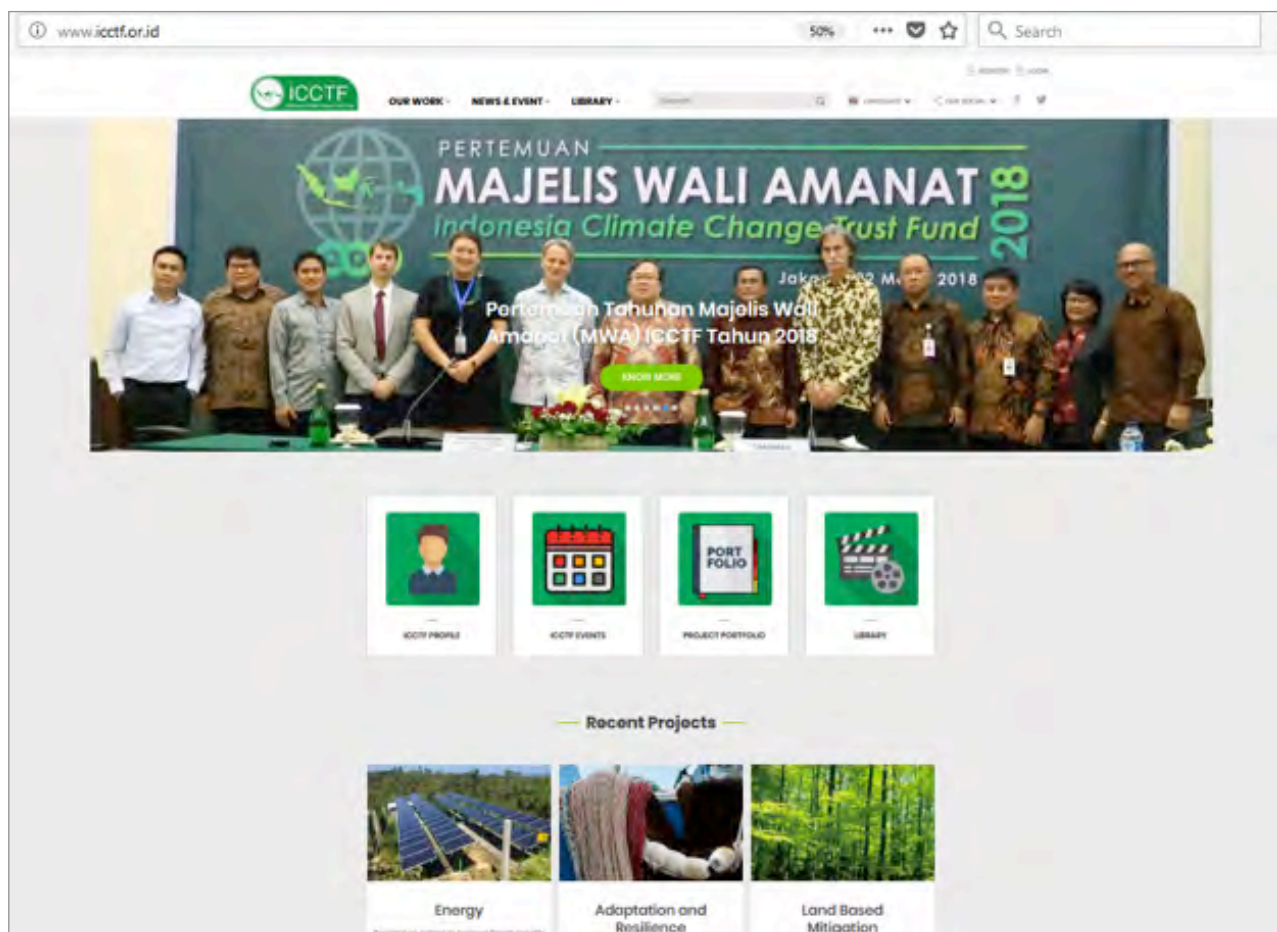
Tampilan media sosial Instagram ICCTF.

dari pelaksanaan program tersebut di tingkat tapak. Dalam setiap kegiatan, ICCTF juga selalu membagikan informasi akun media sosial ICCTF kepada seluruh peserta yang hadir dan mengajak untuk mengikuti (*follow*) dan menyukai (*likes*) akun media sosial ICCTF. Upaya untuk meningkatkan profil ICCTF akan terus dilakukan sepanjang tahun.

Selain optimalisasi media sosial, ICCTF juga melakukan *monitoring* terhadap publikasi dan pemberitaan media yang memuat visibilitas ICCTF, baik di media cetak, elektronik, dan *online* nasional maupun lokal. Dalam tiga bulan pertama, ICCTF telah menghimpun sebanyak

tiga puluh empat (34) pemberitaan media yang memuat visibilitas ICCTF dan mitra pelaksana di daerah. Sejak tahun 2017 hingga saat ini, grafik publikasi dan intensitas ICCTF muncul dalam pemberitaan media menunjukkan peningkatan yang berarti dan grafik yang menanjak. Diharapkan hal ini akan semakin menguat dengan penerapan strategi komunikasi ICCTF dalam menjaga komunikasi dan relasi dengan para awak media.

Pemberitaan ICCTF tersebut secara rinci dapat dilihat pada lampiran di akhir laporan triwulan 1 ini.



Tampilan website ICCTF.

Pertemuan Majelis Wali Amanat (MWA) ICCTF Tahun 2018



Pertemuan MWA ICCTF Tahun 2018 dilaksanakan pada 22 Maret 2018 di Ruang Djunaedi Hadisumarto (DH) 1-2 Kementerian PPN/Bappenas serta dibuka oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang P.S. Brodjonegoro. Dalam sambutannya, Menteri PPN/Kepala Bappenas menyampaikan pentingnya transformasi kelembagaan ICCTF menuju lembaga dana perwalian perubahan iklim yang fleksibel dan independen untuk mendukung kebijakan pembangunan rendah karbon.

Pertemuan ini dilanjutkan dengan penyampaian Laporan Kinerja ICCTF Tahun 2017-2018 oleh Direktur Eksekutif Sekretariat ICCTF serta diskusi yang dimoderatori oleh Direktur Lingkungan Hidup selaku Sekretaris MWA ICCTF. Beberapa isu yang dibahas antara lain Laporan Tahunan ICCTF Tahun 2017, Rencana Kerja Tahunan ICCTF Tahun 2018, *Call for Institution Program* USAID dan UKCCU, *New ICCTF*, Pedoman Teknis (SOP) ICCTF,

Proposal Pendanaan Baru ICCTF, Laporan UNFCCC COP 23, serta *showcase* Media Sosial ICCTF.

Dalam pertemuan ini, seluruh anggota MWA yang hadir aktif memberikan input dan pandangan untuk perbaikan ICCTF kedepannya. Anggota MWA yang hadir atau diwakili dalam pertemuan ini meliputi USAID, UKCCU, Kedutaan Besar Jerman, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Deputi Bidang Pendanaan Bappenas, serta perwakilan organisasi masyarakat sipil (CSO), akademisi dan pihak swasta. Pertemuan ini ditutup dengan penyampaian arahan dari Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam (KSDA) Bappenas, Dr. Ir. Arifin Rudiyanto, selaku Ketua MWA ICCTF.



Beberapa hasil dari pertemuan ini meliputi:

1. Annual Report ICCTF Tahun 2017

- *Annual Report* ICCTF Tahun 2017 perlu dilengkapi dengan benang merah merangkum capaian dan arah kedepan dari ICCTF. *Annual Report* perlu disusun dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris serta disampaikan kembali kepada seluruh anggota MWA untuk mendapatkan tanggapan dan persetujuan.

2. Annual Work Plan ICCTF Tahun 2018

- *Annual Work Plan* ICCTF Tahun 2018 sudah mendapat persetujuan. Detail dari rencana anggaran ICCTF Tahun 2018 perlu disampaikan kepada anggota MWA.

3. Call for Institution UKCCU & USAID

- *Call for Institution* UKCCU sudah mendapat persetujuan.
- *Call for Institution* USAID menunggu persetujuan pihak USAID karena masih dalam proses diskusi antara USAID dengan unit legalnya.

4. Struktur Organisasi Sekretariat ICCTF Tahun 2018

- Struktur Organisasi Sekretariat ICCTF Tahun 2018 telah mendapat persetujuan.

5. Thematic Window ICCTF yang baru “Marine-based”

- Usulan penambahan *thematic window* ICCTF “Marine-based” telah mendapat persetujuan.

6. Pembentukan Task Force New ICCTF

- Pembentukan *Task Force* untuk persiapan New ICCTF disetujui dan akan dibentuk melalui surat resmi Ketua MWA ICCTF.



Menindaklanjuti hasil Pertemuan MWA ICCTF, Ketua MWA ICCTF telah menyampaikan surat resmi kepada seluruh anggota MWA ICCTF yang berisi:

1. Permohonan tanggapan dan persetujuan terhadap *Annual Report* ICCTF 2017.
2. Permohonan untuk menjadi *Task Force* dalam rangka persiapan New ICCTF.
3. Penyampaian notulensi Pertemuan MWA ICCTF Tahun 2018.

Networking merupakan salah satu asset dalam menjalankan sebuah bisnis. Semakin luas *networking* yang dimiliki, semakin besar probabilitas untuk berhasil dalam bisnis. *Networking* adalah membangun kepercayaan, membangun hubungan, tanpa ada kepercayaan tidak ada deal dalam bisnis, kata kunci membangun kepercayaan adalah adaptasi, sejauh mana kita beradaptasi dengan organisasi lain, sejauh itulah kepercayaan dapat dibangun.

Pada triwulan I tahun 2018, ICCTF telah melaksanakan beberapa aktivitas untuk lebih memperkuat dan memperluas jaringannya melalui:

1. Audiensi dengan Anggota MWA ICCTF

Pada triwulan I tahun 2018, ICCTF diwakili oleh Direktur Eksekutif dan Direktur Operasional melakukan audiensi dengan beberapa anggota MWA ICCTF untuk menyampaikan progress dan kondisi terkini ICCTF serta meminta arahan untuk pengembangan kelembagaan dan program ICCTF kedepannya. Beberapa anggota MWA yang ditemui diantaranya Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Prof. Jatna Supriatna dari Universitas Indonesia. Secara keseluruhan, anggota MWA mendukung keberadaan ICCTF sebagai Lembaga *Trust Fund* dalam pengelolaan dana hibah di bidang perubahan iklim. Para anggota MWA juga mengingatkan ICCTF perihal akuntabilitas kelembagaan agar tetap dijaga dan dipertahankan reputasinya. Selain itu, ICCTF harus dapat lebih mengembangkan program yang akan dilaksanakan dan memiliki program unggulan (*champion programs*) yang saleable sehingga dapat meyakinkan para negara donor untuk menyalurkan pendanaannya melalui ICCTF.



Pertemuan dengan Dr. Iskandar Simorangkir, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.



Pertemuan dengan Prof. Suahasil, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.



Pertemuan dengan Dr. Sigit, Kemenko PMK.



Pertemuan dengan Kennedy Simanjuntak, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

2. Kunjungan ke University of Queensland

Pada 7-10 Maret 2018, Direktur Lingkungan Hidup selaku Sekretaris MWA ICCTF dan Direktur Eksekutif Sekretariat ICCTF melakukan kunjungan ke Brisbane, Australia, untuk membahas kerjasama antara ICCTF dengan BRG dan University of Queensland terkait kerjasama pengembangan *Assessing Restoration Effectiveness (ARE) Index*. Tujuan dari *ARE Index* adalah untuk menyediakan informasi pengukuran progres restorasi dan risiko kebakaran. *ARE Index* akan memiliki lima kategori utama indikator efektivitas restorasi yakni: *hydrological, biogeochemical, biological, socio-economic* dan risiko kebakaran. Terkait dengan kategori ini, Bappenas dan ICCTF mengusulkan penambahan kategori yakni kebijakan dan regulasi. Dalam kerjasama proyek ini, ICCTF mengusulkan agar *ARE Index* diujicobakan di lokasi proyek ICCTF-UKCCU di KHG Sungai Kapuas-Sungai Barito di Kalimantan Tengah.



3. Kolaborasi dengan Institusi Lainnya

Selain dengan mitra pelaksana proyek di daerah, ICCTF juga terus berkolaborasi dengan beberapa mitra seperti Sekretariat RAN GRK, Sekretariat RAN API, GIZ INFIS, dan BRG. Pada periode triwulan I, ICCTF juga melakukan peninjauan kerjasama dengan beberapa institusi diantaranya:

- Yayasan Kehati, dalam hal penyusunan proposal perubahan iklim untuk mengakses pendanaan BMUB Jerman.
- Yayasan Peta Bencana, dalam hal pemanfaatan *platform* peta bencana kebakaran hutan dan lahan.
- SeaNet CTC, dalam hal keterlibatan pada *monitoring* dan evaluasi program Sea-Net yakni program penyuluhan bagi nelayan Indonesia skala kecil.
- IISD-GSI, dalam hal kerjasama penyusunan kajian perubahan iklim.
- ICIAR LIPI, dalam hal kerjasama penelitian terkait perubahan iklim.
- Kedutaan Besar Australia, dalam hal kerjasama di bidang *blue carbon*.

Coral Reef Rehabilitation and Management Program Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI)

COREMAP-CTI merupakan program yang diresmikan Pemerintah Indonesia pada bulan Mei 1998 sebagai program 15 tahun yang didanai berbagai donor dengan tujuan “melindungi, merehabilitasi dan mencapai pemanfaatan terumbu karang dan ekosistem terkait yang berkelanjutan di Indonesia, yang juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir”. Program ini dilaksanakan oleh KKP dan LIPI dengan sumber pendanaan hibah GEF dan pinjaman melalui Bank Dunia dan ADB. Pada bulan Maret 2017, KKP menerbitkan surat resmi tentang pembatalan sebagian program COREMAP. Hal ini ditindaklanjuti dengan beberapa pertemuan *Steering Committee* selama bulan April hingga Desember 2017 yang menghasilkan

kesepakatan bahwa program COREMAP untuk komponen hibah GEF melalui Bank Dunia dan ADB akan dialihkan kepada Kementerian PPN/Bappenas melalui ICCTF sebagai *Co-Executing Agency*.

Selama periode Januari-Maret 2018, Bappenas melalui Direktorat Kelautan dan Perikanan serta ICCTF berkoordinasi intensif dengan Bank Dunia, ADB, KKP, serta LIPI untuk menyiapkan *restructuring paper* yakni dokumen yang memuat perubahan desain program COREMAP yang sebelumnya dilaksanakan oleh KKP untuk kemudian dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas melalui ICCTF. Beberapa kriteria yang disepakati untuk desain program COREMAP ini diantaranya: lokasi di area kawasan perlindungan laut (*marine protected area*), mempertahankan tujuan asli, termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, serta sesuai dengan area target KKP. Berikut ini adalah informasi detail Program COREMAP-CTI Komponen Hibah GEF.

	Hibah GEF-Bank Dunia	Hibah GEF-ADB
Tujuan Proyek	<i>To strengthen institutional capacity in coastal ecosystems monitoring and research to produce evidence-based resource management information, and to improve management of priority coastal ecosystems</i>	<i>Sustainable management of coral reef ecosystems in Lesser Sunda Seascape through enhanced capacity to manage coral reef ecosystems in targeted Marine Protected Areas (MPAs)</i>
Durasi Proyek	3 tahun (2018-2021)	3 tahun (2018-2021)
Lokasi Proyek	<ul style="list-style-type: none"> • Raja Ampat, Papua Barat • Teluk Sawu, NTT 	<ul style="list-style-type: none"> • Gilimatra, NTB • Nusa Penida, Bali
Informasi Budget	5.2 juta USD	5 juta USD
Komponen Proyek	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Institutional Strengthening for Coral Reef Management</i> 2. <i>Development of ecosystem-based resource management</i> 3. <i>Strengthening sustainable marine based economy</i> 4. <i>Project Management</i> 	

Restructuring paper program COREMAP-CTI ditargetkan selesai pada bulan Mei 2018. Hingga Maret 2018, telah dilakukan beberapa pertemuan dalam kerangka Misi Kunjungan Bank Dunia dan ADB yang membahas: *project objective & institutional arrangement, financial mechanism & procurement, environmental and social safeguards, proposed activities & costings*. Pada triwulan kedua, koordinasi intensif antara ICCTF dengan Bank Dunia dan ADB akan terus dilakukan untuk memfinalisasi dan menyepakati *restructuring paper* untuk kemudian diajukan kepada GEF. Penandatanganan Perjanjian Hibah (*Grant Agreement*) antara Bappenas dengan Bank Dunia dan ADB direncanakan pada bulan September 2018.

Incorporating Blue Carbon Strategy into Metropolitan Development Bitung-North Minahasa-Manado (IBC-Metro Bimindo)

Dalam rangka pengembangan program yang mengintegrasikan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, ICCTF dengan dukungan GIZ INFIS menyusun proposal *Integrated Blue Carbon Strategy into Metropolitan Development* Bitung-Minahasa Utara-Manado (IBC-Metro Bimindo). Program ini diharapkan mampu memberikan nuansa terbaru dalam pengembangan kawasan metropolitan yang mengintegrasikan aspek biodiversitas, aspek alih fungsi lahan dan aspek pemanfaatan energi terbarukan dalam satu kerangka pengembangan kawasan metropolitan yang terpadu. Pengembangan proposal ini dilatarbelakangi adanya kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jerman melalui BMUB untuk isu *land-based*, energi dan biodiversitas. Dokumen yang akan dihasilkan dari kegiatan ini adalah project sketsa yang akan diajukan untuk mendapatkan pendanaan BMUB.

Sebagai langkah awal untuk menggali informasi tentang Metropolitan Bimindo, pada 15 Maret 2018 telah dilakukan *scoping workshop* di Double Tree Hotel Jakarta. Pertemuan ini dibuka oleh Direktur Lingkungan Hidup Bappenas dan dilanjutkan dengan dua sesi diskusi. Diskusi sesi pertama membahas permasalahan, tantangan dan kebijakan pengembangan Metropolitan Bimindo, termasuk pengembangan *blue carbon* dan integrasi penataan ruang kawasan darat dan laut. Diskusi ini dihadiri 4 narasumber yakni Bappeda Provinsi Sulawesi Utara KKP, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Diskusi sesi kedua membahas kondisi dan tantangan konservasi biodiversitas di Metropolitan Bimindo termasuk isu alih fungsi hutan *mangrove* dan kondisi Taman Nasional Tangkoko. Diskusi ini dihadiri 3 narasumber dari *Conservation International* (CI),

World Resources Institute (WRI) dan Universitas Sam Ratulangi.

Sebagai tindak lanjut *scoping workshop* dan sebagai bahan penyusunan proposal, Tim Konsultan dari GIZ INFIS akan melakukan kunjungan ke Bappeda Provinsi Sulawesi Utara untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan serta koordinasi pernyiapan *Workshop* Pengembangan Metropolitan Bimindo yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2018 di Manado. *Workshop* ini dilaksanakan untuk menggali informasi serta mendapatkan masukan terhadap konsep pengembangan IBC-Metro Bimindo dari *stakeholder* terkait termasuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota Bitung, Minahasa Utara dan Manado, universitas serta NGO/LSM terkait. Setelah *workshop* kegiatan akan dilanjutkan dengan pembentukan konsorsium serta penyusunan *project sketsa* yang direncanakan selesai pada bulan Juni 2018.



Rural Empowerment and Agricultural Development Scalling-up Initiative and Climate Change Adaptation (READ SICCA)

Dilatarbelakangi adanya informasi dari Keduataan Besar Republik Indonesia di Korea Selatan mengenai penerimaan proposal *Green Climate Fund* (GCF), ICCTF bekerjasama dengan Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral Bappenas, IFAD serta GIZ INFIS menyusun proposal pendanaan GCF terkait dengan program pengembangan pertanian dan perdesaan yang dinamai READ-SICCA.

READ-SICCA merupakan program yang dikembangkan dari program READ-SI yang sedang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian melalui pendanaan dari IFAD. Dalam program READ-SICCA, komponen program yang ada dalam READ-SI ditambahkan dengan komponen kegiatan adaptasi perubahan iklim dengan mengambil pembelajaran dari program-program adaptasi yang telah dilaksanakan oleh ICCTF. Komponen kegiatan dari READ-SICCA meliputi: (i) *inclusive climate-risk village agriculture*, (ii) *climate related data management*, (iii) *climate insurance for rural agriculture*, and (iv) *climate-informed policy and regulatory supports*.

Dalam program READ-SICCA, ICCTF akan berperan sebagai lembaga penyalur pendanaan dari GCF melalui IFAD kepada para mitra pelaksana. Sementara IFAD selaku *Accredited Entity* (AE) akan menjadi pihak yang mengajukan *concept note* dan proposal kepada GCF. Dalam pelaksanaannya, IFAD dan ICCTF akan melibatkan beberapa kementerian terkait seperti

Kementerian Pertanian, BMKG, BIG dan BPS serta pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Pengembangan proposal READ-SICCA dilakukan sejak September 2018 melalui beberapa pertemuan untuk menghasilkan dokumen berupa *concept note* yang akan disampaikan kepada GCF. Sejalan dengan proses tersebut, pendekatan kepada BKF Kementerian Keuangan selaku *National Designated Authority* (NDA) juga dilakukan. Namun demikian, pada 18 Januari 2018 dalam pertemuan antara IFAD dan ICCTF di Sari Pacific Hotel Jakarta, pihak IFAD menyampaikan bahwa institusinya masih dalam proses untuk menjadi *Accredited Entity* (AE) sehingga kedua belah pihak baik ICCTF maupun IFAD telah sepakat untuk tidak melanjutkan pengembangan proposal READ-SICCA.



Perkembangan “New ICCTF”

ICCTF dibentuk untuk menjadi “*Trust Fund*” yang dikelola sendiri oleh Pemerintah Indonesia (*nationally managed Trust Fund*) dengan tujuan mengkoordinasikan dan menyalurkan dana untuk membantu kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang sedang dan/atau akan dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Daerah, Universitas, Organisasi Non Pemerintah, maupun Pihak Swasta.

Dengan misi tersebut maka struktur kelembagaan ICCTF diharapkan mampu menangkap dan mengoptimalkan atribut berikut:

1. Memiliki fleksibilitas dalam menerima kontribusi dari semua pihak, baik dalam dan luar negeri, serta menyalurkan dana tersebut ke semua pihak baik ke instansi pemerintah maupun non pemerintah;
2. Pengelolaan keuangannya tidak berada di dalam mekanisme APBN sehingga dapat mengelola pengumpulan dana dalam bentuk investasi (*endowment, sinking, dan/atau revolving fund*) serta membebaskan biaya pengelolaan kepada *Settlor*;
3. Tetap berhubungan erat dengan pemerintah terutama dalam hal penetapan kegiatan yang harus

- sejalan dengan rencana pemerintah; dan
4. Memiliki sistem pengelolaan organisasi berstandar internasional (naskah perjanjian hibah, pengadaan barang/jasa, status kepegawaian, penggunaan aset, dan dasar hukum pembentukan organisasi).

Pada praktiknya, selain ada perbedaan sistem hukum dan belum tersedianya peraturan setingkat Undang-Undang di Indonesia, faktor mendasar yang menjadi hambatan sebuah organisasi *Trust Fund*, khususnya pada kasus ICCTF, adalah perlakuan hibah langsung ke Pemerintah Indonesia yang dianggap sebagai implementasi dari konsep *trust*, padahal hibah langsung memiliki konsep yang berbeda dengan konsep *trust*.

Mengacu pada isu tersebut, paling tidak ada enam opsi yang tersedia bagi ICCTF agar tetap dapat menjadi lembaga “*Trust Fund*” yang dikelola sendiri oleh Pemerintah Indonesia (*nationally managed Trust Fund*), yaitu: 1. Tetap menjadi Satuan Kerja (Satker) 2. Berubah menjadi: a. Badan Layanan Umum (BLU) b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) c. Unit Badan Lainnya (UBL) d. Yayasan e. Sebuah unit di Lembaga Keuangan BUMN.

Dalam rangka pengembangan kelembagaan ICCTF dan sesuai dengan arahan Bapak Menteri PPN/Bappenas untuk mereviu kelembagaan ICCTF, dalam kuartal I 2018, ICCTF bekerjasama dengan SKHA Consulting menjajaki kerjasama dalam pengembangan kelembagaan ICCTF yang baru (*new ICCTF*). Dengan nilai kontrak yang telah disepakati, kerjasama tersebut saat ini sedang dalam tahap proses pengadaan (proses lelang) di bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementerian PPN/Bappenas.

Call For Institution ICCTF - UKCCU 2018

Mulai Tahun 2018, ICCTF memiliki 4 (tiga) fokus program (*windows*) yang mempunyai prioritas tinggi yang tanggap terhadap risiko perubahan iklim, yaitu mitigasi berbasis lahan, energi, adaptasi dan mitigasi berbasis laut. Saat ini emisi dari sektor lahan (perubahan tata guna lahan dan kebakaran lahan) masih mendominasi emisi GRK nasional sehingga banyak upaya pengurangan emisi berasal dari sektor ini. Pada tanggal 5 April

2016, ICCTF dan UKCCU menandatangani perjanjian kerjasama senilai £ 4.000.000 (empat juta *pound sterling*) untuk mendukung ICCTF dalam pelaksanaan program “Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut untuk Mengurangi Emisi di Indonesia melalui Kegiatan Lokal (TEGAK)”. Tujuan dari program ICCTF-UKCCU ini adalah untuk meningkatkan tata kelola hutan dan lahan gambut melalui kerjasama langsung dengan pemerintah di tingkat pusat dan daerah, serta untuk meningkatkan strategi penanggulangan kebakaran dan mempromosikan praktik-praktik terbaik (*best practices*) di masyarakat.

Selama 2017, ICCTF melalui program TEGAK telah bekerja bersama 11 (sebelas) proponent yang berada di 5 (lima) provinsi target yakni Provinsi Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, dimana pelaksanaan kegiatan Program TEGAK ini secara nyata telah mampu mendorong pengelolaan hutan dan lahan gambut dalam mengurangi Emisi CO₂ di Indonesia melalui 4 (empat) *output* dan 6 (enam) *sub output* capaian. Ke-empat *output* tersebut yaitu (1) Mekanisme untuk mengidentifikasi, seleksi, pemilihan proposal dan induction proponent dalam mendukung hutan dan lahan gambut; (2) Proyek yang terpilih memberikan dampak positif untuk pengelolaan hutan dan ekosistem gambut; (3) Proyek yang terpilih memberikan dampak positif dalam strategi pencegahan kebakaran hutan; dan (4) *Monitoring, Evaluation* serta Pembelajaran.

Dalam integrasi ekosistem hidrologis kedalam *map policy* dalam rencana tata ruang Provinsi, Program TEGAK telah mampu mendorong terbitnya Kebijakan tingkat Provinsi dan Kabupaten, yakni Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut di Provinsi Jambi dan di tingkat Kabupaten yaitu tersusunnya *draft* kebijakan mengenai Pengelolaan kawasan gambut dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan dan *draft* kebijakan mengenai hidrologi ekosistem gambut di Kabupaten Meranti. Selain di tingkat Provinsi dan Kabupaten, kebijakan juga didorong di tingkat tapak melalui kebijakan tingkat desa yakni tersusunnya 7 (tujuh) Peraturan Desa (Perdes) mengenai pengelolaan kawasan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta mendorong tersusunnya 13 (tiga belas) rencana aksi daerah dalam pengelolaan kawasan hutan dan lahan gambut.

Program TEGAK juga telah mendorong 55 (lima puluh lima) desa yang ada di 5 (lima) provinsi untuk menggunakan aturan dan prosedur restorasi *re-wetting* dengan pembangunan 181 (seratus delapan puluh satu) sekat kanal dan pembangunan 628 (enam ratus dua puluh delapan) sumur bor. Selain itu juga dilakukan penanaman pada 1.280 ha dengan 192.720 tanaman lokal. Program ini juga mendorong pengelolaan lahan gambut melalui pengelolaan *agroforestry* di 28 (dua puluh delapan) desa. Kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada program ini juga telah dilakukan antara lain dengan Pembentukan dan Fasilitasi MPA (Masyarakat Peduli Api) sebanyak 59 (lima puluh sembilan) MPA yang ada di 5 (lima) provinsi target.

Pada tahun 2018, ke sebelas proponent Program TEGAK akan berakhir semua antara Bulan Februari – Juni 2018.

Untuk tetap dapat mendukung program nasional dalam pengurangan emisi CO₂ sampai dengan 41 % pada tahun 2030 dengan bantuan internasional, terutama di dalam pengelolaan hutan dan lahan gambut, ICCTF memandang perlu adanya keberlanjutan proyek melalui program ini. Untuk itu ICCTF melalui dukungan UKCCU akan melakukan *Call For Institutional* Program TEGAK pada tahun 2018, dengan periode pelaksanaan kegiatan maksimum sampai dengan tanggal 31 Maret 2019.

Program ICCTF-UKCCU pada tahun 2018 akan dilaksanakan pada 2 (dua) lokasi yaitu Semenanjung Kampar di Provinsi Riau (KHG Sungai Siak – Sungai Kampar) serta bekas Pembangunan Lahan Sejuta Gambut Blok A dan E, Kalimantan Tengah (KHG Sungai Kapuas – Sungai Barito). Provinsi Riau dipilih karena merupakan provinsi dengan lahan gambut terbesar di Indonesia yang mencapai 4.827.972 ha, dan merupakan 51,06% dari luas lahan Provinsi Riau (BPS, Kantor Statistik Provinsi Riau, Bappeda Provinsi Riau, 1995), sedangkan Provinsi Kalimantan Tengah dipilih karena kawasan bergambut di Kalimantan Tengah melingkupi hamparan areal yang cukup luas, yakni diperkirakan mencakup areal seluas 3,472 Juta ha, atau sekitar 21,98 % dari total luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang mencapai 15,798 Juta ha. Intervensi di Provinsi Kalimantan Tengah juga perlu dilakukan mengingat pada tahun 2015 terjadi kebakaran yang paling luas di Indonesia, Setidaknya 26.664 ha hutan dan lahan gambut terbakar di Kalimantan tengah (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2015).

Dari keempat fokus program ICCTF, prioritas program yang akan didanai melalui hibah UKCCU ini akan difokuskan pada mitigasi berbasis lahan (*land-based mitigation*). Fokus program pendanaan ini didesain untuk mendukung usaha Pemerintah Indonesia dalam mengurangi emisi yang berasal dari kebakaran hutan, kebun dan lahan di lahan gambut.

Kegiatan program ini harus selaras dengan konsep program restorasi gambut yang diterapkan oleh Badan Restorasi Gambut (BRG) yang dikenal dengan 3R, yaitu *Rewetting* (pembangunan infrastruktur pembasahan gambut melalui teknik sekat kanal (*canal blocking*), penimbunan kanal (*canal backfilling*), sumur bor (*deep wells*), dan teknik lainnya); *Revegetation* (revegetasi melalui penanaman pohon/tanaman endemik gambut); dan *Revitalization of Local Livelihood* (revitalisasi mata pencaharian masyarakat lokal) sesuai dalam dokumen Rencana Kontinjensi Restorasi Gambut 2017.

Prioritas akan diberikan kepada program-program yang berorientasi pada pencapaian *impact*, *outcome* dan *output* sebagai berikut:

Impact:

Hasil keseluruhan dari kegiatan ini adalah manajemen lahan gambut dan hutan yang akuntabel dan responsif terhadap kebakaran hutan di dua provinsi. Indikator keberhasilan adalah tercapainya upaya restorasi lahan gambut bekas terbakar minimal pada 10.000 ha. Selain itu, keseluruhan kegiatan pembangunan sekat kanal dan sumur bor akan meningkatkan potensi stok karbon minimal 8,4 juta ton.

Outcome:

Meningkatnya pengelolaan hutan dan lahan gambut melalui kolaborasi langsung dengan pemerintah di tingkat nasional dan daerah

Indikator:

Jumlah rencana aksi yang disusun di tiap provinsi target, termasuk Surat Pernyataan dari Gubernur dan Pemangku Kepentingan.

Output:

Project yang terpilih memberikan dampak positif untuk pengelolaan hutan dan ekosistem gambut

Sub-output:

- 2.1 Meningkatkan Integrasi ekosistem hidrologis gambut kedalam one map policy dalam rencana tata ruang provinsi

Indikator:

Tersusunnya 2 (dua) dokumen rencana aksi yang disusun di 2 (dua) provinsi target, termasuk Surat Pernyataan dari Gubernur dan Pemangku Kepentingan.

- 2.2 Terlaksananya restorasi dan *re-wetting* pada lahan bekas kebakaran pada *pilot sites* menggunakan aturan dan prosedur yang baku

Indikator:

Terdapat 10 (sepuluh) *pilot sites*/desa yang menggunakan aturan dan prosedur mengenai restorasi dan *re-wetting* di lahan bekas kebakaran melalui SOP dan EWS; Terbangunnya 60 (enam puluh) sekat kanal; 4 (empat) km penimbunan kanal tersier; Terbangunnya 220 (dua ratus dua puluh) sumur bor; dan 2 (dua) tower pemantauan kebakaran hutan dan lahan di masing-masing provinsi target.

- 2.3 Terbangunnya *agroforestry* di ekosistem gambut dan promosi *agroforestry* di ekosistem gambut

Indikator:

Terbangunnya 2 (dua) peat *ecosystem agroforest* yang dibangun melalui pembangunan minimal 5 (lima) demplot di 5 (lima) *pilot sites*/desa; pengkayaan tanaman 100 (seratus) ha di tiap target provinsi/KHG dengan menggunakan model-model *agroforest*.

Low Carbon Development Indonesia (LCDI) (Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon untuk Indonesia)

Low Carbon Development Indonesia adalah kegiatan dengan proses *science-based*, *data-driven*, lintas sektoral secara komprehensif. Inisiatif ini pertama digagas oleh pihak Bappenas bekerjasama dengan pihak Kedutaan Besar Kerajaan Inggris yang mendukung sepenuhnya pelaksanaan kegiatan ini.

Maksud LCDI:

- Penggunaan *modeling* dan riset berkualitas tinggi pada LCDI menekankan *science-based approach* yang ditempuh BAPPENAS.
- Inovasi dalam pendekatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melalui LCDI, sekaligus operasionalisasi dari Perpres Pembangunan Rendah Karbon.
- BAPPENAS melalui LCDI mengintegrasikan seluruh perencanaan sektoral dan tematik, spasial dan non-spasial. Integrasi tersebut dijalankan integratif melalui

pendekatan sistem dan proses yang inklusif. Baik secara internal (lintas kedeputian), eksternal (lintas K/L dan lintas tahapan perencanaan), dan substansi (lintas dimensi pembangunan, seperti pertumbuhan ekonomi dan penurunan emisi).

- LCDI sebagai *new path of sustainable development delivery* di Indonesia perlu di-*mainstream* kepada publik untuk menjadi wacana pembangunan dan *homegrown rallying mechanism* untuk pembangunan berkelanjutan (jika SDG dipandang sebagai *global rallying mechanism*).
- LCDI membuka peluang mereposisi BAPPENAS sebagai *government think tank and system integrator*.
- Reposisi BAPPENAS melalui LCDI memerlukan dukungan strategi komunikasi eksternal yang kuat dan reorganisasi internal yang tanggap terhadap reposisi tersebut.

Tujuan LCDI:

- Mengintegrasikan investasi ke dalam pembangunan rendah karbon untuk mendorong agenda pertumbuhan ekonomi dalam batas-batas biofisik; meningkatkan model investasi dalam model Sistem Dinamis visi Indonesia 2045 untuk *green investment*.
- Menunjukkan kemungkinan berupa solusi-solusi bisnis dan rencana investasi yang sepadan dengan *science-based targets* untuk pembangunan rendah karbon di sektor-sektor terpilih (kehutanan, gambut, pertanian, energi, transportasi, perikanan, dan air) di Indonesia dan pendalaman sub-nasional di Kaltim, Sumsel, Papua/Papua Barat.
- Menjadikan Indonesia sebagai *global champion* bagi kemungkinan transisi menuju pembangunan rendah karbon; mendayagunakan pengungkit (*leverage*) melalui peran para duta (*ambassador*) untuk mempengaruhi perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan di sektor publik dan swasta.

Komponen utama LCDI:

The Low Carbon Development Indonesia (LCDI) terdiri dari dua kemitraan besar (*partnership*) dan sejumlah proyek/kegiatan terkait.

Dua kemitraan tersebut :

- **New Climate Economy (NCE)**, Ekonomi Baru untuk Perubahan Iklim, dengan output :
 1. *Thematic studies* untuk mendukung KLHS dan RPJMN 2020-2024 terutama sisi investasi bagi pembangunan rendah karbon di Indonesia

- Kehutanan/Pertanian
- Energi/Transportasi
- Gambut
- Perikanan
- Air

2. *Investment model* untuk pembangunan rendah karbon, berbasis modeling daya dukung dan daya tampung (KLHS)
3. *Report - Low Carbon Development in Indonesia*. Akan diluncurkan di *Annual Meeting IMF-WB* Bulan Oktober 2018 di Bali.

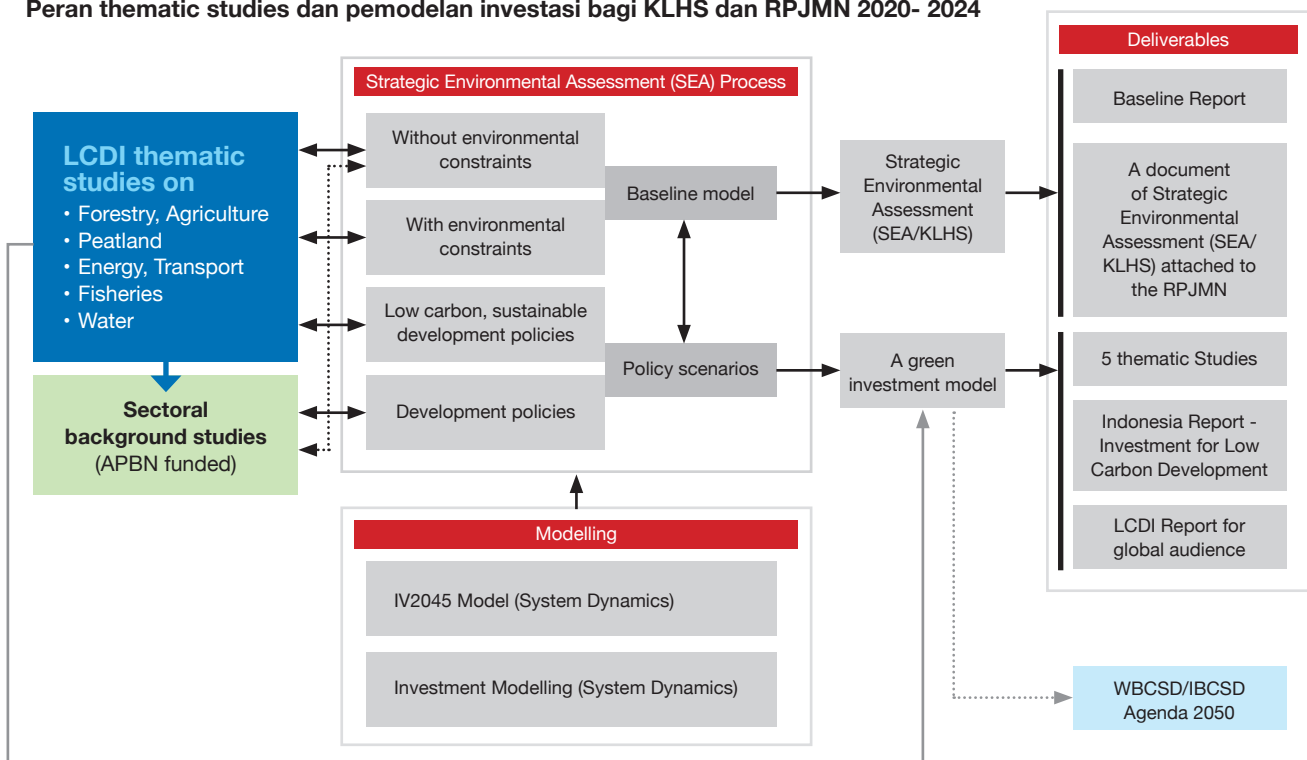
- **New Food and Land Use Economy (FOLU)**, Ekonomi Baru untuk Pangan dan Guna Lahan, dengan *output*:

1. *Science-based targets*.
 - Indonesia (*FABLE modelling*);
 - Sumatra Selatan (*Green Growth Plan/Green Investment Plan*);
 - Kalimantan Timur (*Green Growth Compact*).
2. *Investment package*.
 - Sumatra Selatan;
 - Kalimantan Timur;
 - Papua/Papua Barat.
3. *Action Roadmap: 20 Points Plan for Sustainable Food and Land Use in Indonesia*.

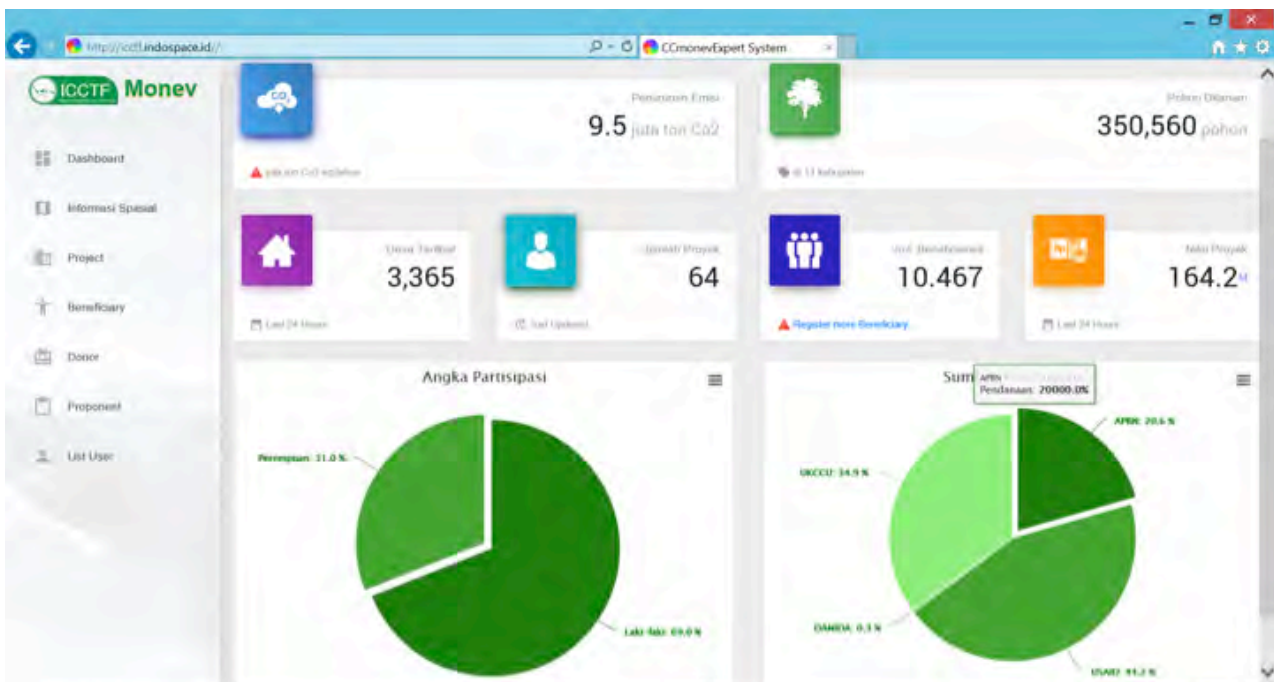
Mitra yang terlibat:

World Resources Institute (WRI), Global Green Growth Institute (GGGI), The Nature Conservancy (TNC), Climate Policy Initiative (CPI), IDeA, World Agroforestry Centre (ICRAF), The Sustainable Trade Initiative (IDH), SystemQ

Peran thematic studies dan pemodelan investasi bagi KLHS dan RPJMN 2020- 2024



Money Tools



Tampilan Web Money Tools ICCTF <http://icctf.indospace.id/>

Pada Bulan Januari 2018 ICCTF menginisiasi rencana pengembangan *Money Tools* berbasis web dan *android*. Tujuan dari pengembangan *Money Tools* ini adalah untuk mempermudah memonitoring capaian perkembangan proyek yang dapat diupdate secara realtime melalui online system oleh para proponent dilapangan. Melalui dukungan GIZ INFIS telah dilaksanakan rangkaian diskusi dan *workshop* penyiapan *Money Tools* selama bulan Januari - Maret 2018.

Beberapa tahapan pengembangan *money tools* yang telah dilakukan antara lain:

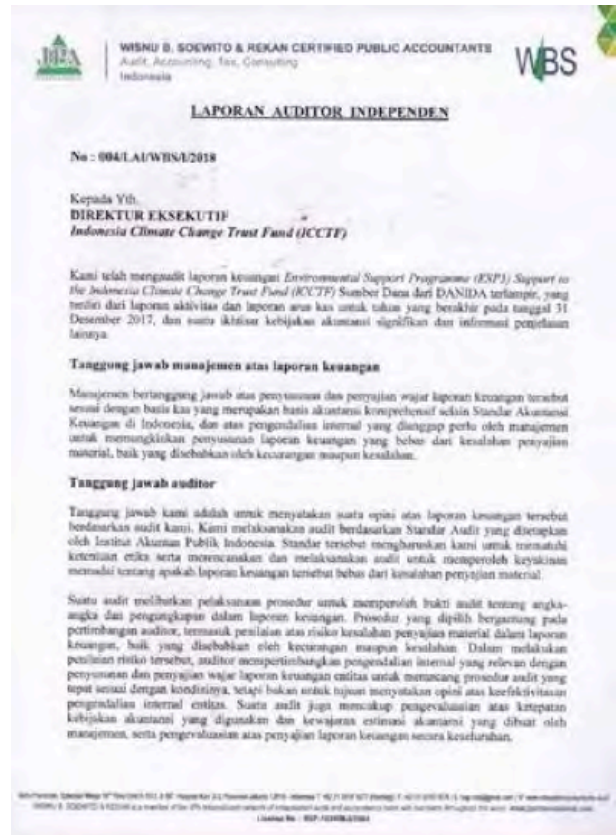
- Menyusun skema *Money tools* yang akan dikembangkan ICCTF.
- Menyusun matriks pengumpulan *data based* dalam format excel.
- Pengumpulan data umum capaian proyek.
- Mengembangkan *web based Money tools* versi 1.0.
- Mengunggah data umum capaian proyek dalam web *Money Tools* versi 1.0.
- *Showcase web money tools* dalam Rapat MWA ICCTF tanggal 22 Maret 2018.

Tindak lanjut pengembangan *Money Tools* yang akan dilakukan selanjutnya antara lain:

- Evaluasi *web based Money Tools* versi 1.0.
- Pengadaan konsultan IT pengembangan Web dan *Android* untuk *Money Tools*.
- Membuat sistem yang lebih *advance & detail* untuk setiap *project*.
- Pemasukan data detail untuk setiap *project* oleh proponent atau Sekretariat ICCTF.

Laporan Audit

Sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas, Laporan Keuangan ICCTF setiap tahunnya diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Internasional dan Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Pada tahun 2017, audit Laporan Keuangan ICCTF dilakukan oleh KAP Wisnu B. Soewito & Rekan dengan Opini wajar tanpa pengecualian. Untuk Laporan Keuangan yang sudah diaudit bisa dilihat dalam lampiran.





LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No : 005/LA/WBS/2018

Kepada Yth.
DIREKTUR EKSEKUTIF
Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)

Kami telah meninjau laporan keuangan *Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)* Tata Kelola Badan dan Lahan Gambut Untuk Mengurangi Emisi Di Indonesia Melalui Kegiatan Lokal Sumber Dana dan UKCCU tahunan, yang terdiri dari laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelajahan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan basis kas yang merupakan basis akuntansi komprehensif selain Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

WBS (Pusat, Gedung WBS) The 6th Floor, Jl. Jendral Sudirman No. 11, Jakarta 10119, Indonesia. T: +62 21 591 7077, F: +62 21 591 7000, E: info@wbs.com, www.wbs.com
WBS (Kantor Cabang) Gedung WBS The 6th Floor, Jl. Jendral Sudirman No. 11, Jakarta 10119, Indonesia. T: +62 21 591 7077, F: +62 21 591 7000, E: info@wbs.com, www.wbs.com
Layanan No. 021-59170000



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No : 006/LA/WBS/2018

Kepada Yth.
DIREKTUR EKSEKUTIF
Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)

Kami telah meninjau laporan keuangan *USAID Support to the Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)* tahunan, yang terdiri dari laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelajahan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan basis kas yang merupakan basis akuntansi komprehensif selain Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

WBS (Pusat, Gedung WBS) The 6th Floor, Jl. Jendral Sudirman No. 11, Jakarta 10119, Indonesia. T: +62 21 591 7077, F: +62 21 591 7000, E: info@wbs.com, www.wbs.com
WBS (Kantor Cabang) Gedung WBS The 6th Floor, Jl. Jendral Sudirman No. 11, Jakarta 10119, Indonesia. T: +62 21 591 7077, F: +62 21 591 7000, E: info@wbs.com, www.wbs.com
Layanan No. 021-59170000

Opini

Meskipun opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, laporan aktivitas *Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)* Tata Kelola Badan dan Lahan Gambut Untuk Mengurangi Emisi Di Indonesia Melalui Kegiatan Lokal Sumber Dana dan UKCCU dan laporan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sesuai dengan basis kas yang merupakan basis akuntansi komprehensif selain Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

Laporan ini disediakan semata-mata untuk informasi dan digunakan oleh manajemen *Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)*, dan tidak digunakan untuk tujuan lain.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
WISNU B. SOEWITO & REKAN
Jalan Usaka No. KEP - 183/KNE/2004



Jakarta, 29 Januari 2018

Opini

Meskipun opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, laporan aktivitas *USAID Support to the Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)* dan laporan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sesuai dengan basis kas yang merupakan basis akuntansi komprehensif selain Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

Laporan ini disediakan semata-mata untuk informasi dan digunakan oleh manajemen *Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)*, dan tidak digunakan untuk tujuan lain.

Laporan keuangan *USAID Support to the Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)* untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 25 Januari 2017.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
WISNU B. SOEWITO & REKAN
Jalan Usaka No. KEP - 183/KNE/2004




Jakarta, 29 Januari 2018

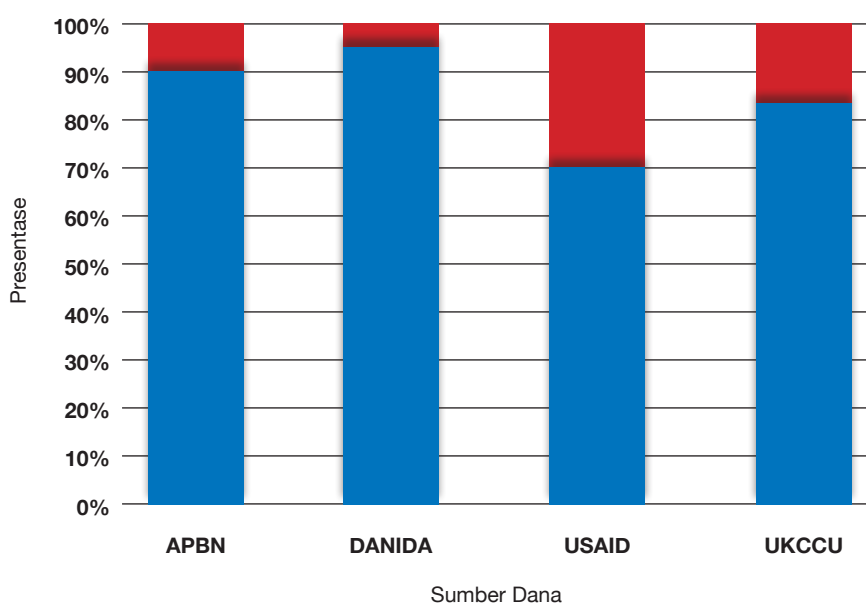
Laporan Keuangan

Serapan Program ICCTF per Januari – Maret 2018

Memasuki awal tahun 2018, layaknya tahun-tahun sebelumnya, Bagian Keuangan ICCTF secara rutin mengadministrasikan, menyiapkan dan melaporkan semua pelaksanaan kegiatan secara tertib dan sesuai dengan kaidah tata kelola yang baik. Pada Tahun 2018, total dana yang dikelola sebesar Rp 95.600.057.030 (Sembilan puluh lima miliar enam ratus juta lima puluh tujuh ribu tiga puluh rupiah) yang berasal dari sumber pendanaan Rupiah Murni APBN dan Hibah Luar Negeri. Capaian serapan pada triwulan pertama tahun 2018 adalah sebesar 24% dari total dana yang dikelola atau sebesar Rp 22.649.788.233. Secara detail dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut:

Sumber Dana	Alokasi Dana 2018	Penyerapan	Persentase
 APBN	19.155.000.000	2.192.917.517	11%
 DANIDA	2.228.595.609	115.732.019	5%
 USAID	26.337.258.721	11.054.823.616	42%
 UKCCU	47.879.202.700	9.286.315.081	19%
TOTAL	95.600.057.030	22.649.788.233	24%

Financial Update Kuartal 1 2018



- Penyerapan
- Alokasi Dana 2018

LESSON LEARNED

ICCTF, TAF dan UKCCU Kunjungi Bentang Pesisir Padang Tikar Kalimantan Barat

Pontianak - Sebagai bagian dari Annual Review 2018 Program FLAG - UKCCU, *Evaluation Management Unit* (EMU) melaksanakan kegiatan kunjungan lapangan ke lokasi program *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) dan *The Asia Foundation* (TAF) yang mendapatkan pendanaan dari *United Kingdom Climate Change Unit* (UKCCU) di Desa Teluk Nibung, Desa Batu Ampat dan Desa Tanjung Harapan, Pulau Padang Tikar, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat pada tanggal 1 – 4 Februari 2018. Kunjungan lapangan ini bertujuan untuk mengumpulkan data pendukung sebagai acuan proses tinjauan tahunan lebih lanjut yang akan dimasukkan dalam Laporan Tahunan FLAG 2018.

Pada kunjungan ini, tim ICCTF, TAF, EMU dan UKCCU berkesempatan bertemu langsung dengan Gubernur Non Aktif Kalimantan Barat, Drs Cornelis MH. Cornelis menyampaikan dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terhadap kebijakan Presiden Jokowi untuk pengembangan Perhutanan Sosial dan Pengelolaan Kawasan Gambut serta Kebakaran Hutan. “Kalimantan Barat telah berkontribusi sebesar 10% dari total capaian luas perhutanan sosial di Indonesia tahun 2017”, ujar Cornelis. “Jumlah kebakaran hutan dan lahan gambut juga berhasil diturunkan, hal ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah pusat maupun mitra pembangunan yang diberikan selama ini”.

Tim juga berkesempatan untuk melihat langsung 2 (dua) dari 10 (sepuluh) desa lokasi program

ICCTF-UKCCU yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Sampan di kawasan bentang Pesisir Padang Tikar. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah rehabilitasi lahan gambut pasca kebakaran dengan penanaman 2.000 bibit kelapa, kopi dan pisang di areal seluas 6 ha di Desa Teluk Nibung. ICCTF-UKCCU merehabilitasi lahan gambut dengan total luas 150 ha dengan 15.000 bibit tanaman kelapa, kopi, pisang, lidah buaya dan asam payak. Hingga saat ini, sebanyak 7.000 bibit telah tertanam.

Selepas mengunjungi Desa Teluk Nibung, tim melanjutkan perjalanan ke Desa Tanjung Harapan untuk memantau salah satu pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan melalui penguatan kapasitas Masyarakat Peduli Api (MPA) dan pemberian bantuan seperangkat alat pemadam kebakaran lahan. Berikutnya, tim mengunjungi program Hutan Desa Batu Ampar yang mendapatkan dukungan pendanaan dari TAF. Program ini telah berhasil membantu masyarakat untuk mendapatkan sertifikat Hutan Desa seluas 33.000 ha dari KLHK pada tahun 2017, konservasi *mangrove* dan pelatihan peningkatan ekonomi alternatif masyarakat melalui pengolahan hasil *mangrove* serta budidaya kepiting dan udang.

“Program rehabilitasi ini dirasakan sangat bermanfaat oleh masyarakat dikarenakan jenis tanamannya yang produktif, kami mengharapkan bantuan seperti ini dapat ditingkatkan”, ujar Mustafa, Kepala Desa Teluk Nibung. “Untuk pencegahan kebakaran lahan, kelompok MPA yang dibentuk telah memiliki kapasitas tanggap pemadaman api dan secara rutin melakukan patroli wilayah, namun ke depannya diharapkan ada dukungan operasional yang saat ini masih swadaya dari masyarakat” tambah, Juheran, Kepala Desa Tanjung Harapan.

Melalui kegiatan kunjungan dan diskusi di lapangan ini, tim dapat melihat dan merasakan bahwa program yang dilaksanakan oleh ICCTF dan TAF melalui pendanaan UKCCU dalam kerangka program FLAG mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

Masyarakat merasakan langsung dampak program ini melalui adanya peningkatan ekonomi dan perbaikan kualitas lingkungannya. Sedangkan dari sisi pemerintah daerah, dukungan program ini sangat membantu dalam mencapai target daerah dan pengembangan kebijakan sebagaimana disampaikan dalam FGD dan

diskusi bersama Staf Khusus Gubernur Kalimantan Barat, Dinas Kehutanan, Dinas ESDM, Dinas Permukiman dan Lingkungan Hidup, serta pihak terkait lainnya. Sebagai tindak lanjut, akan diadakan koordinasi dan komunikasi rutin untuk pengarahan dan *update* pencapaian perkembangan pelaksanaan program antara NGO/CSO pelaksana dengan pemerintah daerah agar sinergis dengan target serta kebijakan daerah maupun nasional.

Inovasi Budidaya Udang Tingkatkan Ekonomi Petani di Kabupaten Pangkep



Peserta Sekolah Lapangan sedang memanen Udang di Tambak

Pemberdayaan masyarakat petani kecil sebagai kelompok rentan dampak perubahan iklim merupakan salah satu inisiatif adaptasi perubahan iklim yang perlu dikembangkan secara luas dan dijaga keberlanjutannya. Melalui kerangka program “Membangun Ketahanan Pangan dan Ekonomi Kelompok Rentan melalui Pertanian Berkelanjutan di Wilayah Rawan Kekeringan di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan” yang didukung pendanaannya oleh ICCTF-USAID, Yayasan FIELD menginisiasi program yang adaptif terhadap perubahan iklim di wilayah Pangkep, Sulawesi Selatan.

Program adaptasi ini berfokus pada pengembangan sektor pertanian, perikanan (termasuk perikanan tangkap yang inovatif dan implementatif) yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan dan mendorong peningkatan ekonomi kelompok rentan melalui penggunaan teknologi tepat guna. Salah satu pendekatannya dengan menyelenggarakan Sekolah Lapangan Adaptasi Perubahan Iklim (SL API).

Penerapan metode analisis agroekosistem dalam Sekolah Lapangan lebih mudah dipahami karena masyarakat diajak untuk belajar melalui pengalaman secara langsung sehingga menguasai segala sesuatu hal yang terjadi terhadap lahan, tanaman dan ternak mereka. Dengan demikian para petani tersebut mampu menentukan sendiri solusi yang dibutuhkan dalam rangka memperkuat ketangguhan terhadap perubahan iklim.

Sekolah Lapangan yang berada di Desa Kanaungan, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep menciptakan inovasi sistem budidaya udang tambak yang lebih baik dari praktek sebelumnya.

Jika dahulu masyarakat tidak melakukan pengolahan dasar tambak, masih menggunakan pupuk kimia dan pestisida, tidak melakukan proses aklimatisasi dan tidak membuat sendiri pakan udang, sekarang masyarakat sudah dapat melakukan proses pengolahan lahan dasar tambak, menggunakan materi organik seperti MOL dan kompos yang lebih ramah lingkungan, mulai melakukan proses aklimatisasi bibit sebelum ditabur, melakukan uji salinitas dan pengukuran suhu, serta berlatih membuat pakan udang sendiri dari bahan lokal.

Untuk memperkaya teori dan pemahaman masyarakat, ICCTF bersama Yayasan FIELD rutin mengadakan pertemuan di Sekolah Lapangan. Kegiatan yang dilakukan meliputi proses pengamatan rutin agroekosistem tambak, analisa agroekosistem tambak, presentasi, diskusi pleno untuk pengambilan keputusan, dan pembahasan topik khusus sesuai kondisi dan masalah yang dihadapi oleh masing-masing petani.

Topik-topik khusus yang dibahas diantaranya tentang pembukaan wawasan siklus air dan ekosistem tambak, pengolahan dasar tambak, *ploting* dan kebutuhan tambak, penyesuaian (aklimatisasi) benur dan nener, uji salinitas dan pengukuran suhu air, pembuatan MOL dan kompos, pengelolaan kualitas air dan pertumbuhan

udang, kualitas air dan budidaya udang dan ikan, pembuatan benih dan pakan sehat untuk udang, panen dan analisa usaha tani tambak. Saat ini jumlah peserta Sekolah Lapangan API Tambak sebanyak 32 orang yang terdiri atas 22 orang laki-laki dan 10 perempuan.

Pada pertemuan ke sepuluh, para anggota melakukan sampling pengamatan dan pengukuran berat rata-rata udang yang dibudidayakan mencapai 250 ekor/kg. Dalam pertemuan tersebut para anggota menyepakati untuk melakukan panen parsial/selektif untuk mengantisipasi banjir yang diprediksikan akan terjadi pada akhir bulan Desember hingga awal Januari 2018.

Pada Desember 2017 sebanyak 37,1 kg dengan berat rata-rata 200 ekor/kg. Sehingga total udang yang dipanen sebanyak 37,1 kg x 200 ekor sama dengan 7.420 ekor dengan total penjualan senilai Rp 1.110.600,00. Melihat potensi ekonomi tersebut, saat ini Kepala Desa menganggarkan di Dana Desa pembelian 3 hingga 5 buah Traktor untuk pengolahan lahan dasar tambak masyarakat.

Aklimatisasi merupakan suatu upaya penyesuaian fisiologis atau adaptasi dari suatu organisme terhadap suatu lingkungan baru yang akan dimasukinya.

Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Ibarat Mata Uang Bernilai bagi Pembangunan Hijau di Magelang

ICCTF bersama Perkumpulan SESAMI (Sedya Samahita Memetri Indonesia) melihat perlunya intervensi mitigasi lahan bekas tambang pasir yang terlantar di wilayah desa Keningar, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Jika dilihat dari citra satelit, tampak bahwa wilayah tersebut memiliki kontur yang tidak beraturan, tandus (kritis), tidak ada tutupan lahan/tanaman, berpasir, dan tidak ada batas fisik tanah yang jelas. Melalui program “Pemanfaatan Biogas untuk Usaha Kemandirian Energi Rumah Tangga sekaligus Ikut Serta dalam Upaya Mendukung Gerakan Konservasi Lingkungan”, ICCTF bersama dengan Sesami merehabilitasi lahan bekas tambang tersebut dengan tanaman keras seperti Sengon, membangun 10 unit *biodigester* (reaktor biogas) bervolume 14 m³ di Desa Ngargomulyo, Sumber dan Keningar, serta pengelolaan pembuatan *bioslurry* sebagai pupuk cair tanaman guna meningkatkan produktivitas pertanian dan ekonomi masyarakat.

Kotoran ternak sapi yang cair, dialirkan ke *biodigester* kemudian oleh Kelompok Keningar Hijau yang diketuai oleh Sukijo, difermentasikan menjadi pupuk cair “*bioslurry*” dengan produktivitas sebesar 1.400 – 2.000 liter/bulan. Pupuk ini sangat efektif dalam merawat ketahanan tanaman tegakan yang ditanam di lahan kritis bekas tambang maupun untuk tanaman cabai yang banyak ditanam warga Keningar. Lahan kritis yang tandus tersebut awalnya hanya ditumbuhi semak dan rumput, sejak program mitigasi ini dimulai, lahan-lahan kritis mulai dipenuhi oleh bibit-bibit tanaman sengon (*Leguminoceae*) yang ditanam di pot anyaman bambu berisi campuran tanah dan humus. Kurang lebih sebanyak 5.000 sengon setinggi 30 cm ditanam di lahan tersebut. Tanaman sengon memiliki bintil akar kuat yang mampu mengikat nitrogen sehingga

memiliki ketahanan dan mampu tumbuh dengan baik di tanah tandus. Pengairan tanaman ini dijamin dengan memasang infus yang memanfaatkan botol plastik bekas air yang dipasang terbalik guna menampung air, dan bagian dasarnya hanya diberi lubang sebesar jarum. Pemupukan menggunakan *bioslurry* semakin memperkuat pertumbuhan tanaman tersebut.

Tim ICCTF-Sesami membangun pusat pembibitan, yang awalnya difokuskan untuk pembibitan sengon kemudian berkembang sebagai pembibitan tanaman hortikultura berkualitas yang siap tanam. *Bioslurry* ini tidak hanya digunakan untuk memupuk tanaman sengon, tetapi juga tanaman hortikultura lainnya yang dibudidayakan oleh masyarakat. Dengan mengganti pola pemupukan dari kimia ke pupuk cair organik *bioslurry*, para petani mendapat keuntungan dari menghemat biaya pembelian pupuk dan peningkatan produktivitas tanaman cabai dan hortikultura. Rata-rata per keluarga mampu meningkatkan pendapatannya sebesar Rp 3.000.000 rupiah per bulan, dan menghemat biaya pembelian gas Rp 180.000 per bulan (rata-rata 3 tabung gas per bulan dengan biaya Rp 60.000 rupiah per tabung).

Keuntungan tidak hanya dirasakan masyarakat petani Keningar, tetapi juga para pemilik lahan yang tanahnya digunakan untuk rehabilitasi dan ditanami tanaman sengon. Mereka terbantu dengan program ini dalam mendapatkan kepastian hak atas tanah dengan batas yang jelas, lahan yang kembali produktif dengan tanaman kayu dan buah-buahan. Selain sengon, lahan kritis tersebut juga ditanami tanaman kopi sebanyak 2.500 batang yang diproyeksikan akan panen pada tahun ketiga. Tanaman sengon akan dipanen pada tahun keenam dengan potensi ekonomi sebesar 2,5

milyar rupiah. Potensi penurunan emisi gas metana sebanyak 1.080 ton/tahun dan penyerapan karbon dari pertumbuhan tanaman tersebut setara dengan 2.202 ton CO₂-eq/tahun.

Program ini menjadi pembelajaran yang baik bahwa keterlibatan dan dukungan banyak pihak sangat penting dalam mendukung keberlanjutan program. Mulai dari warga masyarakat yang secara sadar ikut berpartisipasi aktif, Kelompok Keningar Hijau, pihak pemerintah desa, Bappeda, pemuka agama, dinas terkait seperti BPTH Jawa Tengah, BPDAS Yogyakarta dan juga para mitra pembangunan seperti ICCTF, USAID, serta pemerintah pusat seperti Bappenas. Sosialisasi program, *sharing* pengetahuan dan pengalaman tentang pembibitan

maupun pembuatan *bioslurry* kepada masyarakat secara lebih luas membawa dampak yang lebih baik dan luas.

Tak heran jika Sesami dihadirkan dalam berbagai kegiatan lokakarya yang digelar oleh Bappeda maupun pemerintah daerah tentang pengelolaan lingkungan hidup. Bekerja sama dengan dinas terkait seperti Dinas Perhubungan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Badan Lingkungan Hidup, Bappeda, BPN Kab.Magelang, dan Dinas ESDM Prov. Jawa Tengah, mereka akan membentuk rencana kerja bersama yang menjadi awal pembelajaran bersama bagi masyarakat dan pemerintah kabupaten Magelang.

ICCTF bersama UMP Pantau Satwa Liar Hutan Rawa Gambut Terdegradasi di Hutan Amanah Lestari Kalimantan Tengah

Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMP) melalui dukungan pendanaan ICCTF periode 2016-2018 melakukan kajian pengamatan satwa liar yang masih tersisa di kawasan Hutan Amanah Lestari (HAL) guna menyusun rekomendasi pentingnya melindungi kawasan tersebut dan daerah sekitarnya dari bahaya kebakaran hutan dan lahan terutama saat musim kemarau.

Kerusakan yang terjadi mayoritas disebabkan oleh ulah manusia yang melakukan perambahan dan pencurian kayu (*illegal logging*) di kawasan hutan. Tim UMP melibatkan kelompok-kelompok masyarakat desa di sekitar hutan untuk patroli hutan terhadap praktek illegal logging, patroli api, pengenalan mata pencaharian baru bagi masyarakat yang berkelanjutan, serta penyadartahuan dan pengamanan hutan bersama masyarakat.

Kegiatan pemantauan keberadaan satwa liar di Hutan Amanah Lestari menggunakan metode pengamatan dengan alat *camera trap*. *Camera trap* dipasang di kawasan hutan terutama yang masih mempunyai kerapatan tinggi. Kawasan tersebut hanya tersisa sekitar 20% dari total kawasan 25.000 ha. Hasil pemantauan kamera tersebut dipublikasi kepada khalayak luas dengan memasang informasi di papan pengumuman desa, presentasi dalam berbagai kegiatan seminar, dan publikasi artikel di website UMP.

Selanjutnya, tim melakukan identifikasi dan pemetaan lokasi satwa yang tertangkap kamera pada periode tahun 2016-2017. Lokasi pengamatan yang dipilih adalah kawasan dengan dominasi jenis pohon spesifik yang dilakukan pada musim penghujan dan kemarau. Pengamatan musim hujan dimulai bulan Juli 2016 hingga Desember 2016. Pengamatan pada musim kemarau dilakukan pada bulan April hingga Juni 2017 dengan sistem monitoring sekali dalam sebulan. *Camera trap* ini dipasang di 5 lokasi yang berbeda pada kerapatan hutan yang berbeda pula.

Hasil pengamatan dengan *camera trap* menunjukkan bahwa di kawasan hutan gambut tersisa "Hutan Amanah Lestari" masih terdapat satwa liar berupa Orang Utan, Beruang, Trenggiling, Kucing Hutan, Rusa, Babi Hutan, Beruk dan 3 jenis tupai. Selain itu, ada beberapa jenis burung yang tertangkap kamera seperti Burung Pelatuk, Burung Sabaru dan beberapa Burung Tanah.

Hutan yang tersisa ini terbagi menjadi dua bagian, Timur dan Barat. Hutan tersebut terpisah akibat kebakaran hutan hebat yang terjadi pada tahun 2015. Sebagai upaya mengembalikan ekosistem tersebut, langkah yang sudah dilakukan adalah melalui pembasahan gambut dengan membangun sekat kanal serta penanaman berbagai jenis tanaman endemik hutan gambut di wilayah yang terdegradasi.

Sekat Kanal Desa Nusantara Sumatera Selatan Tunjang Pengairan 1.200 ha Sawah di Lahan Gambut

Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) dan United Kingdom Climate Change Unit (UKCCU) bekerja sama dalam kerangka program “Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut melalui Aktifitas Lokal” yang fokus pada pengelolaan dan pencegahan kebakaran lahan gambut di lima (5) provinsi prioritas (Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat).

Peningkatan kemampuan masyarakat lokal dan desa dalam menggunakan prosedur *re-wetting* atau pembasahan dengan membangun sekat kanal pada lahan gambut merupakan salah satu capaian program. Hingga saat ini, melalui kerangka program tersebut, ICCTF dan UKCCU mampu mendorong sebanyak enam puluh dua (62) desa di lima (5) provinsi dalam menerapkan prosedur pembasahan dengan membangun sekat kanal gambut.

Desa Nusantara yang terletak di Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, merupakan salah satu desa yang menjadi daerah intervensi ICCTF untuk pembangunan sekat kanal gambut di bawah pendampingan mitra pelaksana Walhi Sumatera Selatan. Desa Nusantara merupakan desa yang berada di Jalur 27 dan hanya dapat ditempuh menggunakan kapal motor selama 3 jam. Desa Nusantara merupakan desa yang memiliki lahan sawah padi pada gambut dengan luasan lebih dari 1.500 ha.

Pengelolaan padi di lahan gambut memiliki karakter dan tantangan yang berbeda dibandingkan sawah di lahan mineral biasa. Sukirman, Ketua Kelompok Masyarakat Pengelola Rawa Gambut (KOMPAG), menyatakan saat diskusi dengan tim ICCTF (21/02) bahwa “Tantangan

terbesar adalah saat kemarau, lahan gambut bisa kering dan mempengaruhi hasil panen. Apalagi saat ini, musim tidak menentu”.

Terdapat 2 Sekat Kanal yang dibangun di Desa Nusantara. Sekat Kanal di Desa Nusantara dibangun secara gotong-royong oleh masyarakat lokal yang memang memiliki kesadaran bahwa perlu upaya membasahi lahan gambut agar tidak mudah terbakar sehingga hasil panen pun dapat meningkat. Ternyata, selain memiliki fungsi pembasahan, sekat kanal di Desa Nusantara juga mampu menahan air dengan sistem buka tutup sekat untuk pengairan sawah di Desa Nusantara. Setidaknya terdapat 1.200 ha sawah padi yang mendapat pengairan dari sekat kanal yang dibuat. Sekat kanal dibangun dengan sistem buka tutup sehingga mempermudah pengaturan debit air untuk menghindari banjir. Selain itu Sekat kanal yang dibuat di Desa Nusantara dibangun dengan sistem jembatan sehingga memiliki fungsi ganda sebagai jembatan baru di Desa Nusantara yang membantu membuka akses jalan untuk transportasi dan distribusi hasil panen bagi 1.024 masyarakat atau 512 Kepala Keluarga. “Sekat kanal yang dibangun di sini sangat bermanfaat, setidaknya 1.200 ha lahan sawah mendapatkan manfaat untuk pengairan. Sistem buka tutup sekat kanal juga mempermudah mengatur air sehingga tidak akan banjir”, tambah Sukirman.

Sekat Kanal yang berfungsi ganda sebagai jembatan maupun pengairan di Desa Nusantara, Sumatera Selatan, merupakan salah satu intervensi program ICCTF-UKCCU dan Walhi Sumsel

Produksi Madu Sialang Turut Tingkatkan Ekonomi Masyarakat di Kawasan Hutan Nagari Lubuk Gadang Selatan

Halisman Hia (52 tahun) menceritakan dengan mata penuh binar dan syukur tentang upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menyelamatkan sumberdaya alam di kenagariannya, Lubuk Gadang Selatan. Ia yang dipercaya sebagai Ketua Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) melalui SK Wali Nagari Lubuk Gadang Selatan untuk mengurus hak pengelolaan Hutan Nagari melalui regulasi yang berlaku di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Upaya Halisman tersebut merupakan salah satu contoh kegiatan yang didukung pendanaannya oleh



Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) dan diimplementasikan di lapangan oleh mitra pelaksana Perkumpulan Walestra dalam kerangka “Konservasi Hutan Berbasis Masyarakat dan Mitigasi Perubahan Iklim di Bentang Alam Kerinci Seblat” selama periode Maret 2016 hingga Februari 2018. Program ini bertujuan untuk menyelamatkan kawasan hutan penyangga di bentang alam Kerinci Seblat seluas 338.000 ha melalui pengembangan skema perhutanan sosial yang mendukung mitigasi perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca.

Nagari Lubuk Gadang Selatan, Kabupaten Solok Selatan, merupakan Nagari pemekaran dari Nagari Lubuk Gadang Selatan, bersamaan dengan 3 (tiga) Nagari lainnya. Sejak pemekaran tahun 2007, Lubuk Gadang Selatan yang memiliki luas wilayah ± 201,56 km² ini terus melaksanakan roda pemerintahan dan agenda pembangunannya, termasuk kegiatan pengelolaan sumberdaya alam lestari melalui Perhutanan Sosial, Perhutanan sosial ini berfungsi mempertahankan fungsi ekologi kawasan hutan yang menjadi sumber penghidupan dan pengairan sawah-sawah masyarakat Nagari Lubuk Gadang Selatan, pengembangan PLTMH di jorong-jorong (dusun), menyimpan kekayaan Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), serta Ekowisata.

Masih teringat jelas bagi Halisman, dalam ceritanya ketika Sosialisasi yang dilakukan Konsorsium Perkumpulan Walestra (Walestra, ICS dan CFES) terkait Perhutanan Sosial. Kemudian ditidakanjuti oleh sidang BAMUS (Badan Musyawarah) dan Wali Nagari Lubuk Gadang Selatan yang berujung kepada kesepakatan bersama untuk mendorong pengelolaan Hutan Nagari di Lubuk Gadang Selatan, diperkuat dengan pembentukan kelembagaan serta Peraturan Nagari tentang Pengelolaan Hutan Nagari yang diusulkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui POKJA Perhutanan Sosial Sumatera Barat. Penantian pun seakan satu per satu terjawab dengan

terverifikasinya Pengajuan Permohonan Pengelolaan Hutan Nagari oleh tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 17 November 2017.

Pria Paruh baya dengan topi yang selalu melekat di kepala ini memiliki semangat dan komitmen serta bercita-cita untuk menjadikan pengelolaan Hutan Nagari Lubuk Selatan sebagai contoh pembelajaran yang baik dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Oleh karena itu beliau selalu membuka diri dan ruang diskusi bagi pihak-pihak yang tertarik dan memiliki kepedulian membantu demi kelestarian pengelolaan Hutan Nagari Lubuk Gadang Selatan. “Meski SK menteri KLHK belum kami terima, kami akan tetap berkomitmen dan berupaya menjaga Hutan Nagari kami”, tegasnya. Sembari menunggu SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Halisman bersama rekan seperjuangannya dalam kelembagaan LPHN, terus mengimplementasikan amanah-amanah organisasi yang tertuang dalam Peraturan Nagari, memperkuat kelembagaan dan pengelolaan secara lestari dibuktikan dengan dibentuknya “Lubuk Larangan” yang bekerja sama dengan Pemerintahan Wali Nagari dan Jorong yang berbatasan langsung dengan kawasan Hutan Nagari. Lubuk Larangan telah dimasukkan sebagai destinasi Ekowisata selain wisata alam “Aie Manyuruak”.

Ekowisata “Lubuk Larangan” dan “Aie Manyuruak” merupakan upaya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar yang pengelolaannya telah diusulkan oleh LPHN kepada Wali Nagari dan telah mendapatkan persetujuan BAMUS untuk dikelola secara arif berdasarkan peraturan adat setempat. Selain upaya pengembangan ekonomi alternatif melalui ekowisata, mereka juga melakukan pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) melalui ternak Lebah Madu Sialang. Madu bercitarasa manis ini mengandung beberapa senyawa nutrisi sehat seperti protein, vitamin dan mineral, termasuk niasin, kalsium, tembaga, riboflavin, zat besi, magnesium, potassium dan zinc.



Ketua UMKM Pengembangan Madu Sialang, Sarbom (54 tahun), mengemukakan bahwa “Pendampingan yang dilakukan oleh Konsorsium Perkumpulan Walestra (Walestra, ICS dan CFES) melalui dukungan ICCTF untuk pengembangan produksi madu dari LPHN Lubuk Gadang Selatan sangat bermanfaat sekali, bahkan pengunjung yang akan melakukan Wisata Alam Hutan Nagari dapat menikmati langsung di Tempat Budidaya Madu”.

Halisman pun menambahkan bahwa “Jumlah permintaan terhadap produksi lebah madu diperkirakan meningkat karena pasar yang meluas, tidak hanya di kalangan masyarakat lokal, tetapi juga pasar komersil, pasar tradisional, lokasi-lokasi wisata, mini market, supermarket, dan sentra-sentra oleh-oleh di Jambi”.

Perkumpulan Walestra bersama LPHN dengan dukungan ICCTF menerapkan empat strategi pemasaran Madu Sialang sebagai berikut: 1) pemasaran



Kepala KPHL Hulu DAS Batanghari mengunjungi Pusat Budidaya Madu Sialang LPHN Lubuk Gadang Selatan

melalui penyebaran brosur, 2) penjualan secara langsung kepada konsumen, 3) pemasaran melalui internet (*online shop*) dan media sosial, dan yang ke 4) memasarkan di lokasi objek Wisata Hutan Nagari untuk dikonsumsi secara langsung di tempat budidaya lebah madu tersebut.

12 Sekat Kanal di Desa Segamai dan Desa Gambut Mutiara Kabupaten Pelalawan mampu Meminimalisir 600 ha Lahan Gambut dari Kebakaran

Manfaat pembangunan 12 sekat kanal yang dibangun di dua Desa yakni Desa Segamai dan Desa Gambut Mutiara Kabupaten Pelalawan saat ini telah dirasakan oleh masyarakat. Karakter gambut yang mudah terbakar menyebabkan lahan gambut di dua desa tersebut cukup rentan terhadap kebakaran, terutama di musim kemarau. Pembangunan sekat kanal telah mampu meminimalisir kebakaran hutan dan lahan gambut di dua Desa tersebut. Akibat pembangunan sekat kanal tersebut lahan gambut menjadi basah dan tersedianya air saat kebakaran lahan gambut sehingga pemadaman api saat kebakaran menjadi lebih mudah.

Menurut penuturan Rijaldi, Kepala Desa Segamai, pembangunan sekat kanal ini sangat tepat. “Masyarakat dan Pemerintah Desa sangat mendapatkan manfaat dari pembangunan sekat kanal ini”, tutur Rijaldi saat diskusi dengan Tim ICCTF (27/02).

Berdasarkan diskusi dengan masyarakat di Desa Segamai dan Desa Gambut Mutiara, saat ini telah dibangun sebanyak 12 sekat kanal dengan jumlah 6 sekat kanal setiap desa. Dengan adanya sekat kanal tersebut, mampu meminimalisir kebakaran seluas 600 ha. Jarak antar sekat kanal 500 meter dan setiap sekat kanal mampu mendukung sekitar 500 meter di sisi kanan dan kiri dari sekat kanal tersebut.

Selain membasahi lahan gambut, menurut masyarakat yang paling penting juga mampu menyediakan air saat terjadi kebakaran lahan. Berdasarkan penuturan Edi, salah satu warga yang ikut diskusi memaparkan kebakaran yang terjadi pada Bulan Januari 2018 sangat terbantu dengan sekat kanal yang telah dibangun.

“Kalau tidak ada sekat kanal, mungkin sangat lama pemadaman kebakarannya karena tidak ada air. Saat kebakaran seperti kemaren, biasanya sekitar 1 bulan untuk pemadaman, tetapi kemaren bisa padam dalam waktu 1 minggu karena mudahnya mendapatkan air”. Ujar Edi.

Pembangunan sekat kanal di Desa Segamai dan Gambut Mutiara merupakan salah satu target *output* yang dikerjakan oleh Yayasan Mitra Insani didukung ICCTF. Yayasan Mitra Insani sendiri melalui proyek ini memiliki target pembangunan 20 sekat kanal. Selain sekat kanal, Yayasan Mitra Insani juga melakukan pendampingan masyarakat melalui fasilitasi MPA dan juga pengembangan agroforestry di lahan gambut di 7 Desa yang berada di dua kabupaten yakni Siak dan Pelalawan.

Dua Sekat Kanal Desa Nusantara Mendukung Pengairan 1.200 ha Sawah

Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) didukung oleh United Kingdom Climate Change Unit (UKCCU) saat ini sedang melaksanakan Program Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut melalui Aktifitas Lokal. Salah satu yang dicapai adalah adanya desa atau *pilot sites* yang mampu menggunakan prosedur *re-wetting* yang salah satu kegiatannya adalah pembangunan sekat kana pada lahan gambut. Hingga saat ini Program Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut melalui Aktifitas Lokal telah mampu mendorong 62 Desa di 5 Provinsi yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Salah satu implementasi pembangunan sekat kanal yang dilakukan dalam Program ini adalah di Desa Nusantara, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan, di mana ICCTF bekerjasama dengan Walhi Sumsel dalam implementasi programnya. Desa Nusantara merupakan desa yang berada di Jalur 27 dan dapat ditempuh menggunakan speedboat selama 3 jam. Desa Nusantara merupakan Desa yang memiliki cukup luas sawah padi pada lahan gambut dengan total luas sawah lebih dri 1.500 ha.

Pengelolaan padi di lahan gambut memiliki tantangan tersendiri. Menurut Sukirman, ketua Kelompok Masyarakat Pengelola Rawa Gambut (KOMPAG) menyatakan memiliki tantangan tersendiri dalam mengelola sawah di lahan gambut. “Tantangan terbesar adalah saat kemarau, lahan gambut bisa kering dan

mempengaruhi hasil panen. Apalagi saat ini, musim tidak menentu”, Ungkap Sukirman saat diskusi dengan ICCTF di Desa Nusantara (21/02).

Terdapat 2 Sekat Kanal yang dibangun di Desa Nusantara. Sekat Kanal di Desa Nusantara dibangun secara bersama-sama oleh masyarakat untuk *re-wetting*, untuk membasahi lahan gambut agar tidak mudah terbakar sekaligus mampu mengurangi kebakaran hutan dan lahan gambut. Ternyata, selain untuk melakukan pembasahan, sekat kanal di Desa Nusantara juga mampu menahan air dengan sistem buka tutup sekat untuk pengairan sawah di Desa Nusantara. Setidaknya terdapat 1.200 ha sawah padi mendapat pengairan dari sekat kanal yang dibuat. Sekat kanal yang dibangun menggunakan sistem buka tutup sehingga juga mempermudah mengatur debit air untuk menghindari banjir. Selain itu Sekat kanal yang dibuat di Desa Nusantara dibangun dengan sistem jembatan sehingga sekat kanal juga sebagai jembatan baru di Desa Nusantara yang membantu 1.024 masyarakat atau 512 Kepala Keluarga dalam hal penyediaan jalan untuk mengangkut hasil panen.

“Sekat kanal yang dibangun di sini sangat bermanfaat, setidaknya 1.200 ha lahan sawah yang akan mendapatkan manfaat untuk pengairan. Sistem buka tutup sekat kanal juga mempermudah mengatur air sehingga tidak akan banjir”, tambah Sukirman.

MONITORING PEMBERITAAN ICCTF TAHUN 2018

Equator.co.id, 23 April 2018

Tanam 20 ribu Bibit Pohon

Hari Bumi Internasional di Hutan Desa Bentang Pesisir
23 April 2018

eQuator.co.id – KUBU RAYA -RK. Memperingati Hari Bumi Internasional, Sahabat Masyarakat Pantai (SAMPAN) merehabilitasi hutan Desa Bentang Pesisir Padang Tikar Kecamatan Baru Ampar Kabupaten Kubu Raya, Minggu (22/4). Kegiatan yang dilakukan bersama Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (DITJEN PSKL) beserta rombongan itu menanam 20 ribu berbagai jenis bibit tanaman. Di antaranya bibit kopi liberika untuk mengangkat cita rasa kopi khas tanah gambut.

Hutan Desa Bentang Pesisir Padang Tikar merupakan Hutan Desa terluas di Indonesia. Pengelolaannya berbasis lansekap atau kesatuan ekosistem. Lansekap Bentang Pesisir Padang Tikar merupakan hamparan Bentang Alam yang berada di Pesisir Barat Pulau Kalimantan. Di dalamnya terdapat pula beberapa tipe ekosistem khas daerah pesisir. Disatu sisi kondisi demikian tentunya sangat potensial untuk dikembangkan, namun disisi lain juga memiliki konsekuensi tersendiri serta tingkat tantangan yang cukup tinggi.

SAMPAN Kalimantan sejak tahun 2013 yang lalu melalui dukungan dari berbagai pihak menginisiasi pembangunan Hutan Desa di 10 Desa Bentang Pesisir Padang TIKAR. “Sebagai inisiator sekaligus Lembaga Pendamping kami menyadari sepenuhnya bahwa selain

terdapat peluang untuk pengembangan potensi-potensi lokal yang ada, konsekuensi dan tantangan didalam pengelolaannya juga cukup tinggi,” ujar Direktur Eksekutif Perkumpulan SAMPAN Kalimantan Dede Purwansyah, Minggu (22/4).

Suarapemredkalbar.com, 23 April 2018

<http://suarapemredkalbar.com/berita/ponticity/2018/04/23/potensi-hutan-desa-bentang-pesisir-padang-tikar-menjaga-mangrove-dan-gambut-dengan-budidaya>

Potensi Hutan Desa Bentang Pesisir Padang TIKAR, Menjaga Mangrove dan Gambut dengan Budidaya

Editor kurniawan bernhard 2018-04-23 13:43:19 pm Dibaca : 89

LEPAS INDUK - Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian LHK, Bambang Supriyanto akan melepas induk kepiting di keramba pembenihan kepiting bakau Desa Tanjung Harapan, di area Hutan Desa Bentang Pesisir Padang TIKAR, Sabtu. Bambang Supriyanto, hanya mohon waktu untuk berkemih lantas turun ke keramba demi melihat penangkaran kepiting bakau di Desa Tanjung Harapan, Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Sabtu (21/4) siang. Perjalanan tiga jam menunggang *speedboat* dari Pelabuhan Rasau seperti tak dirasa. Dia yang merupakan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan

Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memang sengaja memilih Hutan Desa Bentang Pesisir Padang TIKAR untuk melewati Hari Bumi Internasional, 22 April tahun ini. Setidaknya tiga kepiting bakau sebesar lebih dari kepala tangan orang dewasa dia lepas ke penangkaran bibit di keramba seluas 25 x 25 meter. Luas itu bisa diisi 600 ekor kepiting yang diharap bisa menghasilkan bibit-bibit baru. Hamparan mangrove enam ribu hektare di desa itu akan disulap jadi lokasi budidaya. Modalnya hanya keramba dan 600 potong paralon dengan panjang kurang lebih 30 sentimeter sebagai rumah kepiting.

Garudapos.com, 21 April 2018

<http://garudapos.com/bangun-kesepahaman-dan-inisiasi-kelembagaan-restorasi-gambut-kabupaten-muba-didukung-konsorsium-icctf-haki/>

Sekayu, garudapos.com – Badan Restorasi Gambut (BRG) melaksanakan diskusi kelompok terfokus atau Forum *Group* Diskusi (FGD) bertempat ruang rapat Hotel Ranggonang, Jumat (20/4/2018). Acara tersebut didukung KPH Lalan – Mendis, DAOPS Manggala Agni, Konsorsium *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) – Hutan Kita *Institute* (HaKI). Dalam kata sambutan Plt Bupati Muba Beni Henedi yang diwakili Asisten II Erdiansyah mengatakan kegiatan ini akan memotivasi meningkatkan kinerja dan mendorong percepatan mewujudkan perbaikan tata kelola lahan khususnya Lahan Gambut. “Kabupaten MUBA yang luasnya mencapai ± 1,4 juta hektar, memiliki kawasan hutan mencapai ± 645 Ribu hektar (46 persen dari luas wilayah kabupaten MUBA) dan Areal Penggunaan Lain mencapai ± 755 ribu hektar (54 persen dari luas wilayah kabupaten MUBA)” ujarnya

Tribunnews, 19 April 2018

<http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/04/19/bahagia-bupati-lihat-masyarakat-mampu-kembangkan-ikan-di-kanal-gambut>

Bahagia Bupati Lihat Masyarakat Mampu Kembangkan Ikan di Kanal Gambut

TRIBUNPEKANBARU.COM,SELATPANJANG- Kanal gambut yang sebelumnya berdampak pada tingginya potensi kebakaran lahan dan hutan, saat ini menjadi sumber ekonomi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti. Dengan pengelolaan yang baik, masyarakat Desa Sungaitohor, Kecamatan Tebingtinggi Timur berhasil memanfaatkan kanal gambut sebagai sarana budidaya ikan.

ANTARA Riau, 19 April 2018

Program ICCTF di Sungai Tohor, Pemkab Meranti dan UR Panen Raya Ikan Keli

Selatpanjang, (Antarariau.com) - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar panen Raya ikan Keli hasil kerjasama pemda setempat dengan Faperika Universitas Riau melalui *Project Program The Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) di Desa Sungai Tohor, Kamis. "Terima kasih atas bantuan program yang telah dijalankan semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat Sungai Tohor dan sekitarnya," kata Bupati Kepulauan Meranti Irwan usai melakukan panen raya Ikan Keli di Desa Sungai Tohor, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Meranti, Kamis. Panen yang dipusatkan di kolam Budidaya Ikan POKMAS Desa Sungai Tohor Projek ICCTF Faperika UR ini juga dihadiri Kepala Dinas Perikanan Provinsi Riau Herman Mahmud, Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Yulian Norwis, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Meranti Anwar Zainal, Ketua TIM *Project ICCTF UR* Joko Samiadji dan lainnya.

News.Co (GoRiau.com), 19 April 2018

Ikan Keli *Project ICCTF* dan Faperika Unri di Seitohor Meranti Mulai Panen

SELATPANJANG - Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi, menghadiri panen raya ikan keli (lele) di Seitohor, Tebingtinggi Timur, Kamis (19/4/2018). Program ini merupakan kerjasama *The Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) dengan Faperika Unri, Pekanbaru 2017-2018. Program tersebut dipusatkan di Seitohor, Tebingtinggi Timur, Kepulauan Meranti, Riau.

Riaugreen.com, 19 April 2018

Bupati Irwan Harapkan Ikan lele Menjadi Komoditi Bisnis Yang Prospek

Kamis, 19 April 2018 | 14:50

MERANTI, RIAUGREEN.COM - Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si melakukan panen raya Ikan Lele di Desa Sungai Tohor, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, panen raya Ikan Lele hasil kerjasama Pemkab Meranti, Universitas Riau melalui *Project ICCTF* itu, dipusatkan di kolam Budidaya Ikan POKMAS Desa Sungai Tohor *Project ICCTF FAPERIKA UR*, Kamis (19/4/2018). Turut bersama Bupati, Kepala Dinas

Riauaktual.com

Bupati Meranti Panen Raya Ikan Keli Kerjasama UR dan ICCTF di Desa Sungai Tohor

Kamis, 19 April 2018 - 14:43:26 WIB Di Baca : 482 Kali

Riauaktual.com - Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si melakukan panen raya Ikan Keli di Desa Sungai Tohor, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, panen raya Ikan Keli hasil kerjasama Pemkab. Meranti, Universitas Riau melalui *Project ICCTF* itu, dipusatkan di kolam Budidaya Ikan POKMAS Desa Sungai Tohor *Project ICCTF FAPERIKA UR*, Kamis (19/4/2018). Turut bersama Bupati, Kepala Dinas Perikanan Provinsi Riau Herman Mahmud M.Si, Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Yulian Norwis SE MM, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Meranti Ir. Anwar Zainal, Ketua TIM *Project ICCTF UR* Ir. Joko Samiadji, Kadis Pariwisata Meranti H. Ismail, Kabag Humas Protokol Meranti Helfandi SE M.Si, Camat Tebing Tinggi Timur Suyatno, Kades Sungai Tohor Efendi dan lainnya.

GoRiau.com

Kamis, 19 April 2018 15:27 WIB

Ikan Keli *Project ICCTF* dan Faperika Unri di Seitohor Meranti Mulai Panen

SELATPANJANG - Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi, menghadiri panen raya ikan keli (lele) di Seitohor, Tebingtinggi Timur, Kamis (19/4/2018). Program ini merupakan kerjasama *The Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) dengan Faperika Unri, Pekanbaru 2017-2018. Program tersebut dipusatkan di Seitohor, Tebingtinggi Timur, Kepulauan Meranti, Riau. Saat panen perdana ikan kolam budidaya kelompok masyarakat ini, dihadiri Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Herman Mahmud, Bupati Kepulauan Meranti

RiauKepri.com, 20 April 2018

<https://www.riaukepri.com/panen-roya-ikan-keli-di-desa-sungai-tohor/>

RiauKepri.com, MERANTI – Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si melakukan panen raya Ikan Keli (lele) di Desa Sungai Tohor, Kecamatan Tebing Tinggi Timur. Panen raya Ikan Keli hasil kerjasama Pemkab. Meranti dengan Universitas Riau melalui *Project ICCTF* itu, dipusatkan di kolam Budidaya Ikan POKMAS Desa Sungai Tohor *Project ICCTF FAPERIKA UR*, Kamis (19/4/2018). Turut bersama Bupati, Kepala Dinas Perikanan Provinsi Riau Herman Mahmud M.Si, Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Yulian Norwis SE MM, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Meranti Ir. Anwar Zainal, Ketua *TIM Project ICCTF UR* Ir. Joko Samiadji, Kadis Pariwisata Meranti H. Ismail, Kabag Humas Protokol Meranti Helfandi SE M.Si, Camat Tebing Tinggi Timur Suyatno, Kades Sungai Tohor Efendi dan lainnya. Pada kesempatan itu Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si melakukan panen di kolam budidaya ikan Keli dengan total 32 kolam. Dari pantauan media, budidaya yang dilakukan oleh Fakultas Perikanan UR dibantu masyarakat Sungai Tohor cukup berhasil, terbukti dengan hasil panen yang cukup banyak dan kualitas ikan yang baik.

Tribunnews Pontianak, 15 April 2018

<http://pontianak.tribunnews.com/2018/04/15/peduli-lingkungan-72-orang-dari-lima-desa-lakukan-rehabilitasi-kawasan-hutan-desa>

Peduli Lingkungan, 72 Orang dari Lima Desa Lakukan Rehabilitasi Kawasan Hutan Desa
Minggu, 15 April 2018 11:31

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG – Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) dari Desa Padu Banjar, Pulau Kumbang dan Pemangkat. Serta Desa Nipah Kuning dan Penjataan Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara (KKU) melakukan rehabilitasi kawasan hutan desanya. Program tersebut merupakan kerjasama *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF), Yayasan Palung dan LPHD dari lima desa itu. Manager Program Perlindungan Satwa (PPS) Yayasan Palung, Edi Rhman memaparkan. Bahwa kegiatan rehabilitasi di kawasan hutan desa di lima desa itu diikuti 72 peserta.

Tribunnews Pontianak, 15 April 2018

<http://pontianak.tribunnews.com/2018/04/15/cara-ini-yang-dilakukan-masyarakat-di-lima-desa-rehabilitasi-kawasan-hutan-desa>

Cara Ini yang Dilakukan Masyarakat di Lima Desa Rehabilitasi Kawasan Hutan Desa

Minggu, 15 April 2018 11:36

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG – Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) dari Desa Padu Banjar, Pulau Kumbang dan Pemangkat. Serta Desa Nipah Kuning dan Penjataan Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara (KKU) melakukan rehabilitasi kawasan hutan desanya. Caranya melakukan rehabilitasi kawasan hutan desa dengan tanaman karet lokal. Memulai kegiatan ini dilakukan Sekolah Lapangan Pembibitan dan Rehabilitasi Kawasan Hutan Desa dengan Tanaman Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Sekolah itu dilaksanakan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Kecamatan Simpang Hilir. “Kegiatan rehabilitasi kawasan hutan desa,” kata Pengurus Yayasan Palung, Petrus Kanisius melalui rilisnya kepada Tribun di Ketapang, Minggu (15/4). “Merupakan hasil kerjasama *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF), Yayasan Palung dan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) dari lima desa,” lanjutnya.

Tribunsumsel.com, 12 April 2018

<http://sumsel.tribunnews.com/2018/04/12/petani-di-banyuasin-ikuti-penyuluhan-budidaya-tanaman-karet>

Petani di Banyuasin Ikuti Penyuluhan Budidaya Tanaman Karet

Kamis, 12 April 2018 14:01

TRIBUNSUMSEL.COM, BANYUASIN – Pusat penelitian Karet atau Balai Penelitian Sembawa memberikan penyuluhan budidaya tanaman karet kepada para petani dan masyarakat Desa Sungai Rengit, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin, Kamis (12/3/2018). Penyuluhan budidaya tanaman karet ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dalam upaya penurunan emisi karbon atau upaya mitigasi pada wilayah rawan bencana kebakaran khususnya lahan gambut tempat petani berkebun karet.

Tribunnews Pontianak, 11 April 2018

<http://pontianak.tribunnews.com/2018/04/11/peduli-produk-tradisional-yayasan-palung-gelar-pelatihan-pengembangan-produk-tikar-pandan>

Peduli Produk Tradisional, Yayasan Palung Gelar Pelatihan Pengembangan Produk Tikar Pandan

Rabu, 11 April 2018 11:33

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG – Yayasan Palung bersama *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) dan pihak terkait lainnya menyelenggarakan pelatihan. Khususnya mengenai pengembangan produk dan desain anyaman tikar pandan dan lidi nipah. Kegiatan dilaksanakan tiga hari di Desa Penjajalan Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara belum lama ini. Pesertanya 22 orang yakni enam orang laki-laki dan 16 perempuan. Ketua UKM Ida Craff, Saparidah menjadi fasilitator pengembangan produk dan anyaman tikar pandan. Sedangkan fasilitator pengembangan anyaman lidi nipah adalah Darwani Anggota Pengarin Kelompok Karya Sejahtera.

Pojokpitu.com, 4 April 2018

<http://pojokpitu.com/baca.php?idurut=61931&&top=1&&ktg=J>

Batik Motif Flora dan Fauna Khas Meru Betiri Jember

Rabu, 04-04-2018 | 13:11 wib

Oleh: Felli Kosasi

Jember pojokpitu.com, Jember kini mempunyai batik tulis baru, yakni batik tulis meru betiri. Batik ini menjadi khas, pasalnya mempunyai motif yang cukup unik yaitu motif flora dan fauna yang ada di dalam taman nasional meru betiri jember. Tak hanya motif yang unik, bahan baku pembuatan batik ini pun menggunakan limbah hutan sehingga sangat ramah lingkungan. Batik tulis ini di produksi oleh ibu ibu di Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Jember, yang merupakan desa penyangga taman nasional meru betiri (tnmb). Untuk pelatihan awal membatik, warga Wonoasri mendapatkan pendampingan dan dukungan dana dari *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) dan Universitas Jember, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan USAID. Batik meru betiri ini menjadi khas karena dalam pewarnaannya menggunakan pewarna alami tanpa menggunakan bahan kimia. Seperti menggunakan akar dan batang pohon *mangrove*, daun jati, tumbuhan putri malu yang seluruhnya tersedia di sekitar kawasan meru betiri.

ANTARA, 4 April 2018

<https://megapolitan.antaranews.co...gunan-puncak>

Pakar: RDTR kendalikan dampak lingkungan pembangunan Puncak

Rabu, 4 April 2018 9:30 WIB

Bogor (AntaraneWS Megapolitan) - Pakar Tata ruang IPB Dr Ernan Rustiadi mengatakan Pemerintah Kabupaten Bogor perlu menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan Puncak agar pembangunan dapat dikendalikan dan dampak lingkungan dapat diminimalisir. "Alih fungsi lahan menjadi salah satu penyebab terus menyusutnya kawasan lindung," kata Ernan yang juga Koordinator Konsorsium Penyelamatan Kawasan Puncak, di Bogor, Rabu. Ernan mengatakan laju pembangunan di kawasan Puncak dengan daya tariknya sudah sangat sulit dibendung. Sementara itu Konsorsium Penyelamatan Kawasan Puncak melansir, terdapat sebanyak 55 titik longsor di Desa Tugu Utara, dan Desa Tugu Selatan yang merupakan dua desa di hulu DAS Ciliwung.

Beritajatim.co, 23 Maret 2018

http://beritajatim.com/gaya_hidup/324242/daun_jati,_mangrove,_putri_malu,_jadi_pewarna_batik_meru_betiri.html

Daun Jati, Mangrove, Putri Malu, Jadi Pewarna Batik Meru Betiri

Jum'at, 23 Maret 2018 22:09:35 WIB

Reporter : Oryza A. Wirawan

Jember (beritajatim.com) - Batik tulis Meru Betiri yang diproduksi warga Desa Wonosari, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Jawa Timur menggunakan pewarna alami tanpa bahan kimia. Batik tulis ini merupakan bagian dari sub program Mitigasi Bencana Berbasis Lahan yang diselenggarakan Universitas Jember dengan dukungan *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan USAID. Aris Rudiarsa, pegiat batik, mengatakan, warna hitam menggunakan akar dan batang tanaman *mangrove*, warna merah dari daun jati, warna krem dari daun tumbuhan Putri Malu. "Pewarna alami lainnya yang tersedia di lingkungan sekitar kami," katanya, sebagaimana dilansir Humas dan Protokol Universitas Jember. Menurut Aris, untuk mendapatkan pewarnaan maksimal, selebar kain harus melewati proses pewarnaan minimal enam kali pencelupan. Setiap kali proses pewarnaan membutuhkan waktu sekitar 36 jam. Proses ini semakin lama jika warna yang digunakannya lebih dari dua. "Penggunaan pewarna alami inilah yang membuat batik produksi kami umumnya bernuansa warna pastel, tidak ada warna yang mencolok," katanya.

Kabarjatim.com, 22 Maret 2018

<https://www.kabarjatim.com/2018/03/perkenalkan-batik-tulis-khas-meru.html>

Perkenalkan Batik Tulis Khas Meru Betiri, Dibuat dari Bahan Alami

Kamis, 22 Maret 2018

JEMBER – Kabupaten Jember kini punya batik tulis khas, Meru Betiri. Batik tulis produksi para ibu di Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo, Jember, yang merupakan desa penyangga Taman Nasional Meru Betiri (TNMB). Motif batik tulis Meru Betiri ini lahir dari program pelatihan membatik yang menjadi salah satu sub program dalam program Mitigasi Bencana Berbasis Lahan yang diselenggarakan oleh Universitas Jember, dengan dukungan dana dari *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappenas, serta USAID. Perkenalan dan peluncuran batik tulis Meru Betiri dilaksanakan hari Selasa sore, di balai Desa Wonoasri (20/3). Terdapat 13 motif batik yang semuanya bersumber dari kekayaan hayati TNMB. Uniknya lagi semua batik tulis karya ibu-ibu Desa Wonoasri adalah batik tulis yang menggunakan pewarna alami.

Surya.co.id, 2 April 2018

<http://surabaya.tribunnews.com/2018/04/02/unej-dan-tnmb-jember-lakukan-pemberdayaan-masyarakat-hasilnya-ciptakan-batik-baru-dan-ini>

Unej dan TNMB Jember Lakukan Pemberdayaan Masyarakat, Hasilnya Ciptakan Batik baru dan Ini

Senin, 2 April 2018 16:19

SURYA.co.id | JEMBER - Batik Meru Betiri merupakan batik jenis baru di Jember. Batik ini tercipta setelah *The Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) Universitas Jember (Unej) dan Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) memberi pelatihan kepada ibu-ibu Desa Wonoasri, Tempurejo, Jember. Keunggulan batik ini adalah penggunaan warna alami yang ramah lingkungan. Untuk menghasilkan batik Meru Betiri yang sempurna, harus melalui beberapa tahap proses produksi yang membutuhkan ketelatenan dan kesabaran ekstra.

Bahan-bahan yang digunakan adalah ranting tanaman *mangrove*, kulit kayu pohon jambal, dan pohon sengon. Dengan menggunakan bahan alami tersebut meminimalisir pencemaran air sisa pembuatan batik.

Cendananews.com, 22 Maret 2018

<https://www.cendananews.com/2018/...-betiri.html>

Jember Miliki 13 Motif Batik Meru Betiri

Jurnalis ME Bijo Dirajo - 22 Mar 2018 - 11:45

JEMBER — Kabupaten Jember, Jawa Timur, memiliki 13 motif batik tulis yang semuanya bersumber dari kekayaan hayati Taman Nasional Meru Betiri yang diproduksi ibu-ibu di Desa Wonoasri yang merupakan desa penyangga hutan Taman Nasional Meru Betiri. “Ada 13 motif batik yang telah kami buat yang idenya bersumber dari kekayaan flora Taman Nasional Meru Betiri seperti motif bunga rafflesia, cabe jawa, dan blarak atau daun kelapa,” kata Supmini Wardhani yang bertugas menjadi desainer dalam kelompok Kehati Meru Betiri yang merupakan kelompok pembatik yang pembentukannya difasilitasi oleh para peneliti Universitas Jember, Kamis.

Selain itu, lanjut dia, juga ada motif elang Jawa, sisik trenggiling, dan macan tutul mengambil dari fauna yang berada di kawasan Taman Nasional Meru Betiri, bahkan ada juga motif perpaduan antara flora dengan fauna yakni tawon rafflesia. Kelompok Kehati Meru Betiri beranggotakan 46 anggota yang telah mendapatkan pelatihan membatik selama 14 hari dengan bimbingan guru batik Soediono dari sanggar batik Godhong Mbako, Kabupaten Jember. Motif batik tulis Meru Betiri tersebut lahir dari program pelatihan membatik yang menjadi salah satu sub program dalam program Mitigasi Bencana Berbasis Lahan yang diselenggarakan oleh Universitas Jember, dengan dukungan dana dari *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappenas, serta USAID.

Beritajatim.com, 23 Maret 2018

http://beritajatim.com/gaya_hidup/324240/perkenalkan:_inilah_batik_tulis_meru_betiri.html

Perkenalkan: Inilah Batik Tulis Meru Betiri

Jum'at, 23 Maret 2018 21:20:35 WIB

Reporter : Oryza A. Wirawan

Jember (beritajatim.com) - Para perempuan Desa Wonosari, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Jawa Timur memproduksi 13 motif batik tulis khas Meru Betiri. Desa tersebut merupakan desa penyangga Taman Nasional Meru Betiri. Batik tulis ini merupakan bagian dari sub program Mitigasi Bencana Berbasis Lahan yang diselenggarakan Universitas Jember dengan dukungan *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan USAID. Motif-motif tersebut didesain Kehati Meru Betiri, kelompok pembatik yang pembentukannya difasilitasi para peneliti Universitas Jember. Kelompok ini beranggotakan 46 anggota dan telah mendapatkan pelatihan membatik selama 14 hari oleh Soediono dari sanggar batik Godhong Mbako, Jember.

Surabaya.tribunnews.com, 22 Maret 2018

<http://surabaya.tribunnews.com/2018/03/22/meru-betiri-batik-baru-kabupaten-jember-yang-ramah-lingkungan-ini-filosofinya>

Meru Betiri, Batik Baru Kabupaten Jember yang Ramah Lingkungan, Ini Filosofinya

Kamis, 22 Maret 2018 13:40

SURYA.co.id | JEMBER - Kabupaten Jember memiliki motif batikbaru, yakni batik tulis Meru Betiri. Batik ini diprakarsai beberapa pihak dan ibu-ibu di Desa Wonoasri, Tempurejo, Jember, yang merupakan desa penyangga Taman Nasional Meru Betiri (TNMB). Program pelatihan membatik yang menjadi salah satu sub program dalam program Mitigasi Bencana Berbasis Lahan (MBBL) yang diselenggarakan oleh Universitas Jember (Unej), dengan dukungan dana dari *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bappenas, serta USAID, menjadi awal lahirnya motif batik tulis Meru Betiri ini. Perkenalan dan peluncuran batik tulis Meru Betiri dilaksanakan hari Selasa sore, di balai Desa Wonoasri (20/3/2018).

ANTARA JATIM, 22 Maret 2018

Ini Lho 13 Motif Batik Tulis Khas Meru Betiri

Kamis, 22 Maret 2018 8:56 WIB

Jember (Antaraneews Jatim) - Kabupaten Jember, Jawa Timur, memiliki 13 motif batik tulis yang semuanya bersumber dari kekayaan hayati Taman Nasional Meru Betiri yang diproduksi ibu-ibu di Desa Wonoasri yang merupakan desa penyangga hutan Taman Nasional Meru Betiri. "Ada 13 motif batik yang telah kami buat yang idenya bersumber dari kekayaan flora Taman Nasional Meru Betiri seperti motif bunga raflesia, cabe jawa, dan blarak atau daun kelapa," kata Supmini Wardhani yang bertugas menjadi desainer dalam kelompok Kehati Meru Betiri yang merupakan kelompok pembatik yang pembentukannya difasilitasi oleh para peneliti Universitas Jember, Kamis. Selain itu, lanjut dia, juga ada motif elang Jawa, sisik trenggiling, dan macan tutul mengambil dari fauna yang berada di kawasan Taman Nasional Meru Betiri, bahkan ada juga motif perpaduan antara flora dengan fauna yakni tawon raflesia. Kelompok Kehati Meru Betiri beranggotakan 46 anggota yang telah mendapatkan pelatihan membatik selama 14 hari dengan bimbingan guru batik Soediono dari sanggar batik Godhong Mbako, Kabupaten Jember. Motif batik tulis Meru Betiri tersebut lahir dari program pelatihan membatik yang menjadi salah satu sub program dalam program Mitigasi Bencana Berbasis Lahan yang diselenggarakan oleh Universitas Jember, dengan dukungan dana dari *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappenas, serta USAID.

Acehsatu.com, 13 Maret 2018

<https://acehsatu.com/100-hektare-pohon-ditanam-di-gunung-geureudong-bener-meriah/>

100 Hektare Pohon Ditanam di Gunung Geureudong Bener Meriah

Wan Kurnia, 13 Maret 2018

ACEHSATU.COM | BENER MERIAH — Bupati Bener Meriah Ahmadi SE didampingi Wakil Bupati Tgk H Abuya Syarkawi, turut berpartisipasi menanam pohon di kawasan hutan lindung, Gunung Geureudong di Benyer Pepanyi dan Nosar Baru pada Sabtu, 10 Maret 2018. Sebanyak 20.000 batang pohon yang akan ditanami ditempat tersebut guna melestarikan hutan lindung yang sempat ditebangi beberapa tahun kebelakang oleh masyarakat untuk bercocok tanaman. Kegiatan yang dilaksanakan oleh *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) bekerjasama dengan Yayasan Leuser Internasional (YLI), Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah, Bupati Ahmadi akan komit untuk melestarikan dan melindungi hutan tersebut sebagai pusat sumber air yang mengairi di beberapa kecamatan di Bener Meriah.

Leuserantara.com, 10 Maret 2018

<http://leuserantara.com/100-ha-lahan-paya-rebol-direboisasi/>

100 ha Lahan Paya Rebol Direboisasi

10 Maret 2018, 292 views

REDELONG (LeuserAntara): Pemkab Bener Meriah bersama Yayasan Leuser Internasional (YLI), melakukan reboisasi di hutan Lindung Paya Rebol seluas 100 hektar. Hal ini juga menepis komentar miring beberapa waktu lalu, yang mengatakan telah terjadi perusakan hutan dan tanaman saat digelar *offroad* HUT Kabupaten Bener Meriah. Bupati Bener Meriah Ahmadi SE didampingi Wakil Bupati Tgk H Abuya Syarkawi, turut berpartisipasi menanam pohon di kawasan hutan lindung, gunung Geureudong di Benyer Pepanyi dan Nosar Baru, tepatnya Paya Rebol, pada Sabtu,

(10/3/2018). Sebanyak 20.000 batang pohon, ditanami ditempat tersebut guna melestarikan hutan lindung yang sempat ditebangi beberapa tahun kebelakang oleh masyarakat untuk bercocok tanaman. Kegiatan yang didukung oleh *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) bekerjasama dengan Yayasan Leuser Internasional (YLI), Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah, disambut baik oleh masyarakat. Bupati Ahmadi akan komit untuk melestarikan dan melindungi hutan tersebut sebagai pusat sumber air yang mengairi di beberapa kecamatan di Bener Meriah.

Habadaily.com, 9 Maret 2018

<http://habadaily.com/netizen/12272/icctf-dan-yli-rehab-100-hektar-hutan-geureudong.html>

ICCTF dan YLI Rehab 100 Hektar Hutan Geureudong

Redaksi | habadaily.com | 09 Maret 2018, 20:41 WIB

HABADAILY.COM - ICCTF kerjasama Yayasan Leuser Internasional (YLI) merehabilitasi 100 hektar hutan lindung di Gunung Geureudong dengan menanam 20 ribu bibit pohon. Mereka juga menanam 4 ribu tanaman buah untuk menambah penghasilan 100 KK petani kopi di sana, Jumat (09/03/2018). Sedangkan penanaman 20 ribu bibit pohon, tahap pertama dimulai, Sabtu (10/03/2018) di kawasan hutan lindung Paya Rebol, Gampong Nosar Baru, Bener Meriah. Sebanyak 7 ribu tanaman pohon dan buah akan ditanam di hutan lindung tersebut. "Kegiatan ini fokus pada rehabilitasi di kawasan hutan lindung Paya Rebol yang

merupakan daerah tangkapan air (*water catchment area*) yang menjadi sumber kebutuhan air sehari-hari masyarakat di sejumlah kawasan, seperti Gampong Bener Pepanyi, Kecamatan Permata dan Gampong Nosar Baru, Kecamatan Bener Kelipah, Bener Meriah," jelas *Leader Project* ICCTF-YLI, Tommy Mulyadi. Ia juga mengatakan, tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan cadangan karbon dan pendapatan petani kopi melalui pengayaan tanaman dan penerapan teknologi *Climate Smart Coffee Production System* (CSCPS) dan pendekatan ZWF (*Zero Waste Farming*).

RRI News.com

Selamatkan Hutan Lindung, 20.000 Bibit Pohon Ditanam di Gunung Geureudong

10 Maret 2018, 197 views

KBRN, Redelong: Sebanyak 20.000 bibit pohon ditanam di kawasan hutan lindung gunung geuredong yang berada di kampung Nosar Baru dan Bener Pepanyi, Sabtu (10/3/2018). Kegiatan tersebut merupakan kerjasama antara pemerintah kabupaten Bener Meriah, Yayasan Lauser Internasional (YLI) dan *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) serta masyarakat setempat dalam upaya pelestarian dan perlindungan hutan di wilayah tersebut. Bupati Bener Meriah Ahmadi SE mengatakan untuk menjaga kawasan hutan tersebut pihaknya akan membentuk beberapa tim yang akan

melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kawasan hutan lindung sesuai titik koordinat yang telah ditetapkan. Kawasan hutan lindung tersebut sebelumnya sempat beralih fungsi menjadi lahan pertanian masyarakat. Oleh karena itu program tersebut dinilai sangat membantu pemerintah kabupaten Bener Meriah dalam mengembalikan fungsi hutan lindung. Ahmadi juga menyebut keberadaan hutan lindung dikawasan itu merupakan pusat sumber air bersih yang selama ini dimanfaatkan masyarakat di sejumlah kecamatan dikabupaten tersebut.

Acehnews.com

100 Hektare Hutan Gunung Geurudong Direhabilitasi

10 Maret 2018

BANDA ACEH | AcehNews.net - *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) bekerjasama dengan Yayasan Leuser Internasional (YLI) melakukan rehabilitasi 100 hektare kawasan hutan lindung Gunung Geureudong atau yang lebih dikenal dengan sebutan Burni Telong, melalui penanaman 20 ribu bibit pohon. Mereka juga melakukan peningkatan kapasitas dan pendapatan 100 Kepala Keluarga (KK) petani kopi dengan penanaman 4.000 tanaman buah, Jumat (09/03/2018). Penanaman tahap pertama 20 ribu bibit pohon tersebut akan berlangsung pada Sabtu

(10/03/2018) hari ini, di kawasan hutan lindung Paya Rebol, Gampong Nosar Baru, Bener Meriah. Sebanyak 7.000 tanaman pohon dan buah akan ditanam di hutan lindung tersebut. "Kegiatan ini fokus pada rehabilitasi di kawasan hutan lindung Paya Rebol yang merupakan daerah tangkapan air (*water catchment area*) yang menjadi sumber kebutuhan air sehari-hari masyarakat di sejumlah kawasan, seperti Gampong Bener Pepanyi, Kecamatan Permata, dan Gampong Nosar Baru, Kecamatan Bener Kelipah, Bener Meriah," jelas *Leader Project* ICCTF-YLI, Tommy Mulyadi.

Pontianak Tribunnews.com, 12 Februari 2018

<http://pontianak.tribunnews.com/2018/02/12/petani-terapkanbudidaya-padi-infari-32dengan-metode-hazton>

Petani Terapkan Budidaya Padi Infari 32 Dengan Metode *Hazton*

Senin, 12 Februari 2018 16:12 WIB

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG – Sebagian besar penduduk di Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara merupakan petani dengan cara atau metode bertani tadah hujan. Ini diungkapkan Manager Program Perlindungan Satwa (PPS-Hukum) YP, Edi Rahman. Ia mengungkapkan namun saat ini petani di Desa Penjajaan dan Pulau Kumbang Kecamatan Simpang Hilir. Hampir semuanya sudah mencoba menggunakan metode *hazton* dengan membuat demplot untuk budidaya padi infari 32. "Tidak bisa disangkal bahwa petani memiliki peran sangat penting

dalam menyediakan pangan bagi suatu negara," kata Edi melalui rilis Pengurus YP Ketapang, Petrus Kanisius, Senin (12/2). Menurutnya akibat berkurangnya petani saat ini sudah mulai dirasakan dampaknya untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Misalnya Pemerintah harus *import* beras dari negara tetangga dan lain sebagainya. "Sebab itu sudah saatnya untuk mandiri dalam hal pangan dengan mengoptimalkan potensi pertanian. Khususnya petani di Desa Penjajaan, Nipah Kuning, Pemangkat, Pulau Kumbang dan Padu BanjarKecamatan Simpang Hilir," ucapnya.

Belitungtribunnews.com, 20 Januari 2018

<http://belitung.tribunnews.com/2018/01/20/gusong-bugis-siapkan-dermaga-sunset>

Gusong Bugis Siapkan Dermaga Sunset

Sabtu, 20 Januari 2018 09:04

Penulis: Wahyu Kurniawan

Editor: edy yusmanto

POSBELITUNG.COM, BELITUNG - Sebuah dermaga sunset sedang dibangun di objek wisata Gusong Bugis, Desa Juru Seberang, Tanjungpandan. Rencananya dermaga itu bakal rampung dan bisa dinikmati pengunjung pada Februari 2018 mendatang. Gusong Bugis adalah kawasan pantai eks tambang timah yang kini dikelola oleh kelompok Hutan Kemasyarakatan (HKM) Seberang Bersatu. Sedangkan pembangunan

dermaga sunset adalah bagian dari program *Belitung Mangrove Park* yang dikerjakan oleh kelompok HKM tersebut bersama organisasi Terumbu Karang Indonesia (Terangi) dan *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) tahun 2017.

Ketua HKM Seberang Bersatu Marwandi mengatakan, dermaga *sunset* dibangun berbentuk lingkaran berdiameter 36 meter. Pada bagian tengah lingkaran juga dibangun kafe bertema kafe sunset. "Dari pantai ke dermaga itu panjangnya sekitar 150 meter, Insya Allah Februari ini bisa rampung," kata Marwandi kepada Pos Belitung, Jumat (19/1/2018).

Centong, Alat Pengukur Curah Hujan

KM Rensing Bat_Keadaan cuaca yang tidak menentu menjadi salah satu kendala para petani di Desa Rensing Bat Kecamatan Sakra Barat di saat menentukan waktu tanam tanamannya, sebab metode hitung-hitungan secara tradisional yang di terapkan selama ini tidak akurat sehingga sering sekali keliru dalam memperediksi waktu tanam dan waktu panen. Melihat kondisi yang seperti ini selalu dialami setiap tahunnya, para petani yang tergabung dalam Klub Pengukur Curah Hujan (KPCH) yang bersekretariat di rumah Pengurus kelompok tani Loker Maju Dayen Kubur Dusun Lepok tersebut, memanfaatkan sebuah alat sederhana yang dapat digunakan untuk memprediksi cuaca. Alat yang berfungsi menampung curah hujan ini disebut "Centong" berukuran 12 x 22 cm di tempelkan pada sebuah bambu atau kayu berukuran 1,5 meter yang di letakkan berdiri di pematang sawah atau di tengah sawah yang tidak boleh terlindung dengan pohon maupun bangunan, centong di taruh dengan jarak 20 samapai 25 meter dengan centong yang lainnya dan di biarkan selama 24 jam guna menampung curah hujan. Cara kerja Centong terbilang cukup sederhana, petani akan mengukur curah hujan yang tertampung di dalam centong tersebut. Selanjutnya petani akan menganalisis dan memprediksi curah hujan selama beberapa bulan kedepan. Dari sinilah petani akan menyusun skenario cuaca untuk menentukan masa tanam dan masa panennya.

Sebelumnya, petani diberikan pelatihan oleh Puska Universitas Indonesia (UI) yaitu Guru Besar Antropologi FISIP UI (Yunita T. Winarto) sebagai penggagas KPCH hingga bisa membuat strategi bertani dengan skenario cuaca bulanan berdasarkan hasil pengamatan curah hujan harian. Biasanya petani di Desa Rensing Bat menanam

padi akhir tahun antara Bulan Desember dan Awal Tahun di bulan Januari dan akan panen antara bulan Maret dan Bulan April. Pada Bulan Mei dan Juni mereka biasa lanjutkan dengan menanam tembakau dan panen di bulan September dan Oktober. KPCH di Lombok Timur sudah berjalan baik. Respon petani menggembirakan. Berharap, lewat KPCH ini bisa mengurangi dampak perubahan iklim yang kian hari makin dirasakan petani, seperti yang disampaikan Kepala Bidang Perkebunan Kabupaten Lombok Timur Assyairul Kabir,S.Pt,M.Sc saat mengikuti Audit oleh *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) dari Kementerian PPN/BAPPENAS pusat kepada KPCH tentang penggunaan bantuan yang di berikan. Acara ini berlangsung pada hari Selasa (9/1/2018) di Sekretariat Kelompok Tani Loker Maju Desa Rensing Bat.hadir juga dalam kesempatan tersebut Kepala Desa Rensing Bat Muhammad Hilmi,SE dan perwakilan dari masing-masing KPCH kecamatan lain di kabupaten Lombok Timur. ICTTF sendiri merupakan lembaga wali amanat pada perwalian perubahan iklim Indonesia yang bertindak sebagai penyalur dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan perubahan iklim. Perwalian ini di operasikan dan di kelola oleh wali amanah yang didirikan oleh Kementerian PPN/BAPPENAS. Dalam dua tahun sejak 2014 pertama dibentuk, sudah ada belasan KPCH di Lima kecamatan di Lombok Timur. Lima Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Keruak, Jerowaru, Sakra Barat, Sakra dan Sakra Timur. Selama ini petani kesulitan memahami ramalan cuaca dari BMKG. Keterbatasan pengetahuan menjadi penyebab mereka sukar mencerna istilah ramalan cuaca BMKG. Lewat KPCH, ini semua dibuat sederhana dan mudah dipahami. Ke depan, petani diarahkan bisa memahami kondisi lahan, dan asupan pupuk untuk memaksimalkan hasil tani. a_m

Republika

Indonesia, Negara Maritim Terancam Perubahan Iklim

Jumat 02 Februari 2018 22:21 WIB

Red: Fitriyan Zamzami

Bayangkan apabila peta yang anak cucu kita miliki berbeda dengan peta yang kita kenal di masa lalu. Garis pantai Indonesia sebagai negara maritim akan semakin terkikis dan sekitar ribuan pulau kecil terhapus diganti lautan. Kira-kira, apa gerangan yang menyebabkannya?

Jawaban yang paling masuk akal dan ilmiah adalah perubahan iklim. Jika selama ini sebagian orang mengartikan perubahan iklim sebagai pemanasan global dan perubahan pola cuaca saja, maka sesungguhnya perubahan iklim lebih daripada itu. Meningkatnya suhu bumi menyebabkan es-es di kutub mencair. Akibatnya, muka air laut terus naik dan perlahan menggenangi daratan. Dari tahun 1960-2008, muka air laut di Indonesia

memiliki laju peningkatan sebesar 0.8 milimeter tahun. Laju tersebut telah melonjak naik menjadi 7 milimeter per tahun dari tahun 1993. Menurut Achmad Poernomo selaku Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan pada November 2015 menyatakan bahwa berdasarkan penelitian ahli, pada tahun 2050, peningkatan muka air laut akan mencapai 90 sentimeter, sebagaimana dilansir dari Jakarta Post. Contoh dari partisipasi tersebut dapat dilihat dari sekumpulan pemuda penerima hibah dari Lembaga Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia (*Indonesia Climate Change Trust Fund/ICCTF*) di Bandung 2017 lalu. Dengan kreativitasnya, mereka berjuang bersama penduduk melalui berbagai cara unik; seperti pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Kerinci, pemanfaatan tenaga surya untuk menjalankan pipa pada lahan kering di NTB sehingga menjadi pertanian produktif, juga pemanfaatan teknologi untuk membantu nelayan kecil mengatasi ketidakpastian waktu dan lokasi tangkap di pesisir selatan Jawa.

Antara, 11 Januari 2018

<https://jatim.antaranews.com/lihat/24107/program-mitigasi-berbasis-lahan-di-tnmb-dievaluasi>

Program Mitigasi Berbasis Lahan di TNMB Dievaluasi

Kamis, 11 Januari 2018 22:04 WIB

Jember (Antaraneews Jatim) - Universitas Jember (Unej) mengevaluasi program mitigasi berbasis lahan di kawasan Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) dengan menggelar "Focus Group Discussion" (FGD) bersama dengan petani, TNMB, dan pihak pemerintah desa di Balai Desa Wonoasri, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis. Koordinator Program Mitigasi Berbasis Lahan yang juga Wakil Rektor II Unej Wachju Subchan di Jember mengatakan program mitigasi berbasis lahan yang dilaksanakan sejak Maret 2017 telah memasuki salah satu tahapan penting, yakni penanaman bibit pohon di lahan rehabilitasi seluas 255 hektare di kawasan TNMB. "Pada September 2017, tim peneliti Unej membagikan 92.324 bibit pohon durian, langsep, pakem, dan kemiri kepada para petani penggarap secara bertahap dengan harapan petani dapat menjaga tanaman tersebut hingga pada saatnya nanti panen tiba

dan petani pula yang mengambil hasilnya," katanya. Selama menunggu panen, lanjut dia, petani juga diberikan bibit tanaman cabai jawa, dan tanaman obat lainnya yang dapat diolah menjadi berbagai produk yang dapat dijual. "Targetnya, program yang didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappenas, ICCTF, USAID serta TNMB itu mampu mengembalikan kondisi lahan seperti semula, sekaligus memberikan bekal keterampilan bagi petani di Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo agar mandiri sehingga tidak lagi merambah hutan," tuturnya. Sementara Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah II Ambulu Agus Setyabudi mengaku agak kecewa dengan para petani yang menggarap lahan tersebut karena jumlah bibit pohon yang diberikan tidak sama dengan jumlah pohon yang ditanam.

Antara Jatim, 8 Januari 2018

<https://jatim.antaranews.com/lihat/berita/246896/petani-penggarap-lahan-reboisasi-tnmb-dapat-pelatihan-budi-daya-semut-rang-rang>

Petani Penggarap Lahan Reboisasi TNMB Dapat Pelatihan Budidaya Semut Rang-rang

Senin, 8 Januari 2018 21:09 WIB

Jember (Antaraneews Jatim) - Universitas Jember (Unej) memberikan pelatihan budi daya semut rang-rang kepada puluhan petani penggarap lahan reboisasi Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) di Desa Wonoasri, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dosen Program Studi Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Unej Sigit Prastowo di Jember, Senin mengatakan pihaknya telah memberikan pelatihan tentang budi daya dan potensi usaha ternak semut rang-rang (kroto) bagi petani di Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo. "Budidaya semut rang-rang tidak memerlukan modal besar, lokasi budi daya pun bisa di rumah, dan pakan juga mudah, sehingga cocok bagi usaha sampingan petani," tuturnya. Menurutnya budi daya semut rang-rang atau semut ankrang (kroto) memiliki prospek yang cerah karena saat ini kebutuhan kroto atau telur semut ankrang untuk pakan burung berkicau di Jember ditaksir mencapai 250 kilogram per hari. "Permintaan kroto itu semakin tinggi di kota besar, seperti Jakarta yang mencapai 1.500 kilogram per hari, sehingga dengan harga rata-rata satu ons kroto mencapai Rp 12.000 hingga Rp 14.000 maka bisa

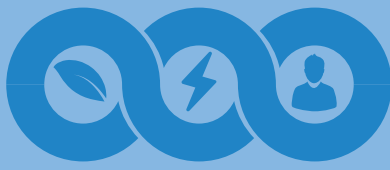
dibayangkan berapa keuntungan yang akan didapat petani peternak semut rang-rang," tuturnya. Kendati demikian, lanjut dia, peternak semut rang-rang belum mampu memenuhi kebutuhan permintaan pasar tersebut, salah satunya karena minimnya peternak, sehingga potensi budidaya semut rang-rang masih terbuka lebar. Selain mendapatkan materi dari kalangan akademisi Fakultas Pertanian Unej, para petani Desa Wonoasri juga berkesempatan untuk melakukan praktik dengan bimbingan peternak semut rang-rang asal Desa Jambesari, Kecamatan Mumbulsari, Anang. "Selama ini saya kewalahan melayani permintaan kroto, bahkan sarang semut rang-rang yang belum waktunya dipanen pun dibeli karena saat ini boleh dikata di Jember tinggal saya yang terus berusaha di bidang budidaya semut rang-rang," ucap peternak yang melakukan budidaya kroto sejak 2014. Anang mengatakan kroto tetap dibutuhkan selama masih banyak penggemar burung berkicau dan masyarakat yang suka memancing, sehingga prospek budi daya semut rang-rang sangat cerah untuk mendapatkan keuntungan. Sementara koordinator program Wachju Subchan mengatakan

pelatihan budidaya semut rang-rang kepada 25 petani penggarap lahan reboisasi TN Meru Betiri merupakan salah satu kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Unej. Kegiatan itu dalam rangka pelaksanaan program “Pengelolaan Kawasan Rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri Melalui Pengembangan Desain Demonstrasi Plot dengan Prioritas Jenis Tanaman yang memiliki Fungsi Penutupan Lahan Sepanjang Tahun” yang mendapatkan pendanaan dari ICCTF, Bappenas, Kementerian LH dan Kehutanan, serta TN Meru Betiri. “Selain memberikan pelatihan budi daya semut rang-rang, para peneliti Kampus Unej telah memberikan

pelatihan pembuatan jamu, budidaya jamur dan kegiatan produktif lainnya dengan harapan para petani mendapatkan tambahan penghasilan, sehingga tidak lagi merambah hasil hutan TN Meru Betiri. Bahkan jika ditekuni, budidaya semut rang-rang bisa mendatangkan untung cukup besar,”ujarnya.

(*)

Pewartu : Zumrotun Solichah
Editor: Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA 2018



MITIGATION | ENERGY | ADAPTATION

